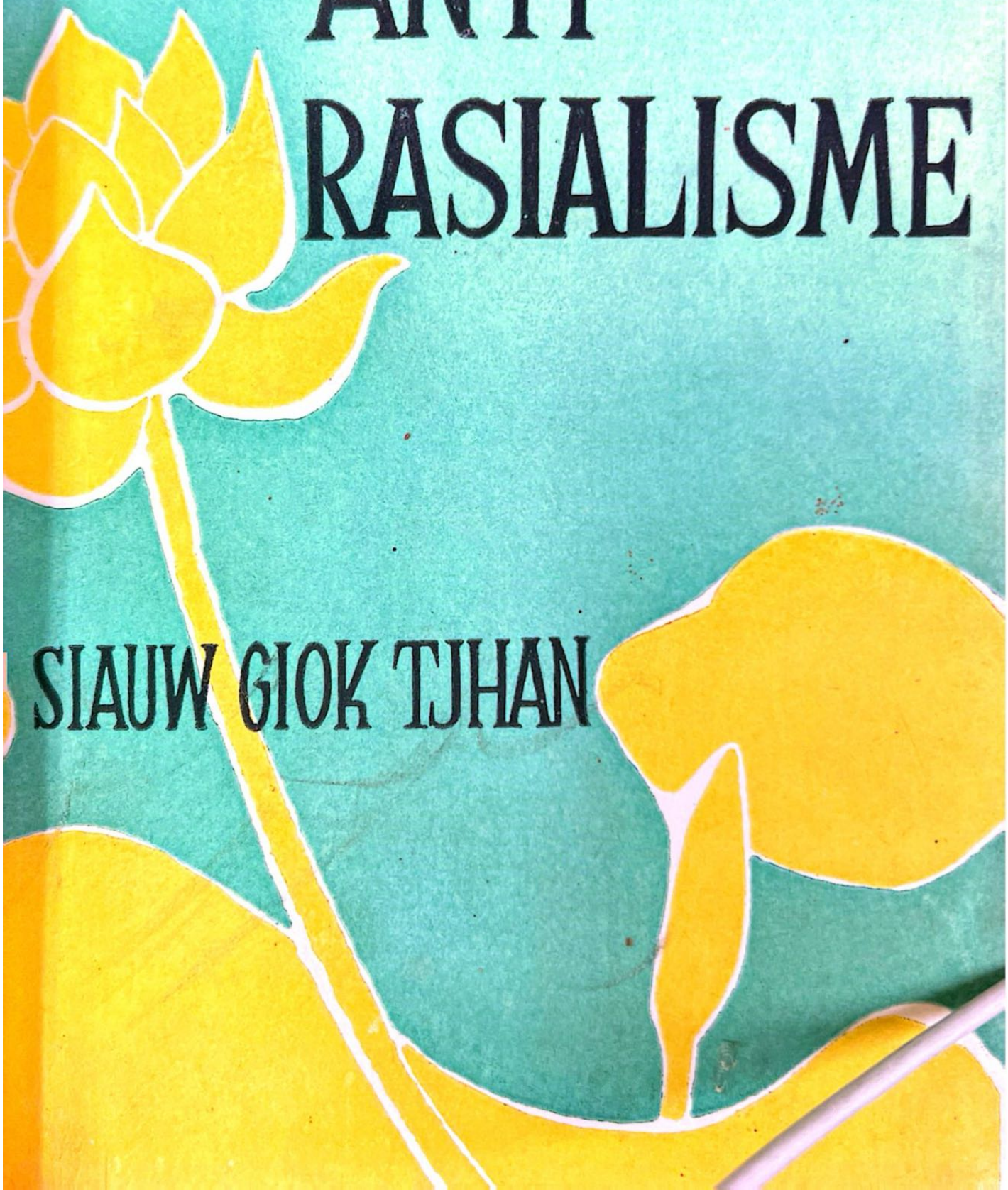
NTJA SILA ANTI RASIALISME



SIAUW GIOK TJHAN

Pantja Sila Anti Rasialisme

INDO-4111

Pantja Sila Anti Rasialisme

Siauw Giok Tjhan

BAPERKI

Bagian Penerbitan
PUSAT BAPERKI

KATA PENGANTAR PENERBIT

Penerbit telah mengambil putusan untuk menerbitkan buku ini dengan djudul **„Pantja Sila Anti Rasialisme"**, berdasarkan pertimbangan[1] sebagai berikut :

1. Didalam proses "nation-building" Indonesia menudju kemasjarakat sosialis, jang bersih daripada "exploitation de l'homme par l'homme", kita ternjata perlu mempertinggi kewaspadaan nasional kita, supaja revolusi kita tetap murni dan segar.
2. Arti kata "nation" dan "race" jang diterdjemahkan dengan „bangsa" memang masih menimbulkan kekaburan.
3. Kekaburan itu terutama bersumber pada aliran "rasialisme", jang dapat menjelewengkan revolusi kita, jang pada hakekatnja adalah perdjuangan klas, mendjadi pertentangan ras.

Selandjutnja mengingat, bahwa Pantja Sila mengandung djuga Sila Perikemanusiaan, maka terasa perlu untuk mempertegas, bahwa "rasialisme" telah **dibantah dasar ilmiahnja** oleh 14 orang sardjana, jang dipilih oleh PBB untuk melaksanakan penjelidikan. Hasil penjelidikan 14 orang sardjana dunia itu disjahkan dalam bentuk "Statement on Race" oleh Sidang Umum PBB. Didalamnja dapat didjumpai pernjataan[2] sebagai berikut :

a. National religions, geographic, linguistic and cultural groups do not necessariry coincide with racial groups ; and the cultural traits of such groups have not demonstrated genetic connection with racial traits.
(Kelompok[2] nasional, agama, geografi, bahasa dan kebudajaan tidak perlu djatuh bersama dengan kelompok[2] rasial ; dan tjiri[2] kebudajaan dari kelompok[2] itu tidak mempunjai hubungan genetik jang njata dengan tjiri[2] rasnja).

b. It would be better when speaking of human races to drop the term "race" all together and speak of ethnic groups.
(Adalah lebih bidjaksana, apabila berbitjara tentang ras manusia untuk tidak menggunakan istilah „ras" sama sekali dan bitjaralah tentang kelompok[2] ethnik).

c. The biological fact of race and the myth of "race" should be distinguished. For all practical social purpose, "race" is not so much biological phenomena as a social myth. The myth of "race" has created an enormous amount of human and social damages.
(Fakta biologis tentang ras dan mithos tentang „ras" haruslah dibedakan. Untuk segala persoalan masjarakat jang praktis, „ras" lebih merupakan mithos sosial daripada gedjala biologis belaka. Mithos — dongengan —

„ras" ini telah mentjiptakan kerusakan² besar bagi masjarakat dan ummat manusia).

Baik sekali dalam hubungan dengan usaha untuk melenjapkan tjiri² suatu kelompok ethnik, antara lain dengan „andjuran" ganti nama, umpamanja, kita perhatikan, dalam rangka usaha mengembangkan pengakuan dan perindahan terhadap hak² azasi manusia, ketegasan dari "Convention on the Punishmen tand Prevention of the Crime of Genocide" (Konvensi Tentang Penghukuman Dan Pentjegahan Kedjahatan Genocide), seperti disjahkan oleh Sidang Umum PBB. Sebagai kedjahatan "genocide" (pembasmian manusia) itu dimaksudkan :

"Committing certain acts with intent to destroy, in whole or in part, national, ethnical, racial or religious group as such.
(Melakukan tindakan² tertentu dengan maksud untuk menghantjurkan — sebagian atau seluruhnja, kelompok² nasional, ethnik, rasial atau agama sebagai kelompok).

"The acts, constitute genocide are killing, causing serious bodily or mental harm, deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent birth, and the forcible transfer of children."
(Tindakan² jang termasuk genocide adalah pembunuhan, menjebabkan kerusakan badaniah atau rochaniah, dengan sengadja mentjiptakan sjarat² hidup jang diperhitungkan guna membawa kehantjuran/kemusnaan pada keseluruhan atau sebagian, mengambil tindakan² dengan tudjuan mentjegah kelahiran atau memindahkan anak² setjara paksa).

Djadi usaha melenjapkan suatu kelompok ethnik, baik setjara badaniah maupun setjara rochaniah, termasuk perbuatan genocide jang terkutuk.

Achirnja baik sekali kita perhatikan, bahwa nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme jang dibangkitkan dan diperkokoh dalam perdjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Dalam „Lahirnja Pantja Sila" Presiden Soekarno telah mempertegas : **Nasionalisme hanjalah dapat subur didalam tamansarinja internasionalisme. Internasionalisme hanjalah dapat hidup subur, djikalau berakar dibumi nasionalisme. Dua ini harus wahju-mewahjui satu sama lain !**

Buku ini disusun berdasarkan laporan Saudara Siauw Giok Tjhan sebagai Ketua Umum Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) pada Konperensi Baperki dan sebagai penerbit kami mengharapkan pikiran²nja dapat membantu usaha memelihara revolusi kita tetap segar dan murni menudju kemasjarakat sosialis, jang bersih dari exploitation de l'homme par l'homme !

Djakarta, Desember 1962. **Penerbit**

MADJU TERUS MELALUI DJALAN PANTJA SILA DENGAN MANIPOL SEBAGAI KOMPASNJA

Konperensi Pleno Baperki kali ini dimulai bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Pengurus Pusat Harian memang sengadja memilih tanggal ini dengan harapan, bahwa berlangsungnja konperensi pleno pada Hari Pahlawan ini akan dapat mempengaruhi baik usaha memperhebat kebulatan tekad barisan massa Baperki untuk melaksanakan tugas sedjarahnja guna menjempurnakan dan mengkonkritkan hasil segala pengorbanan pahlawan jang telah diberikan oleh para pahlawan kita dalam perdjuangan mempertegak dan menjelamatkan Republik Indonesia, Republik Proklamasi 1945 sebagai modal pertama untuk membangun masjarakat sosialis sebagai pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia.

Untuk mengkonkritkan penghormatan massa Baperki pada segala djasa para pahlawan kita jang telah mendahului kita meninggalkan dunia fana ini dalam perdjuangan melaksanakan tiga kerangka revolusi seperti didjelaskan dalam Manifesto Politik, Jajasan Pendidikan & Kebudajaan Baperki pada tanggal 10 Nopember ini akan meresmikan penggunaan Gedung Fakultas Tehnik Baperki, jang akan memperluas kesempatan bagi para pemuda kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu tehnik, supaja dapat mengabdikan diri setjara lebih baik pada perkembangan pembangunan masjarakat dalam revolusi menudju kemasjarakat sosialis, jang tidak mengenal lagi adanja exploitation de l'homme par l'homme. Sebagai permulaan sebentar sore akan diresmikan penggunaan bangunan pertama dari Fakultas Tehnik, jang luasnja 2.000 meter persegi, berikut sebuah bangunan sementara jang luasnja 400 meter persegi.

Seperti dikatakan tadi konperensi pleno ini terutama ditudjukan untuk memperhebat kebulatan tekad massa Baperki untuk melaksanakan tugas sedjarahnja, jakni tudjuan Baperki sebagai organisasi massa, jang dengan tegas telah menjatakan :

a. Menjetudjui dengan bulat garis Presiden Soekarno tentang tjara penjelesaian masalah minority, seperti dirumuskan dalam amanat Presiden Soekarno pada Kongres Baperki di Solo.

b. Memperlantjar proses pembangunan nation, jang berwudjud masjarakat sosialis, jang mendjamin penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan, bebas dari rasa takut akan menderita kemelaratan dengan berachirnja sistim exploitation de l'homme par l'homme.

c. Mendukung pelaksanaan Manifesto Politik dan menjatakan sedia membantu aktif pelaksanaan pengerahan funds and forces progressif untuk memperlantjar proses menudju kemasjarakat sosialis.

d. Memperdjuangkan setjara lebih sungguh² pelaksanaan semua pedoman pelaksanaan Manipol untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan Manipol.

e. Mengusahakan meratanja indoktrinasi Manipol-Usdek-Resopim dan kemauan melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan", terutama dikalangan kader dan massa Baperki sendiri.

Oleh karenanja, terasa ada manfaatnja, apabila pada permulaan konperensi ini kita terutama memperhatikan berbagai hal, jang mendjadikan dasar untuk merumuskan program perdjuangan dan program kerdja Baperki sebagai organisasi massa, jang tegas mendukung Manipol itu.

Paling pertama tentu ada baik sekali, apabila kita menjegarkan ingatan kita tentang isi amanat Presiden Soekarno pada Kongres Baperki, jang kita telah setudjui dengan suara bulat untuk dilaksanakan setjara sungguh² dan intensif.

Isi amanat Presiden itu selengkapnja adalah sebagai berikut :

„Bangsa Indonesia menurut kenjataan terdiri dari berbagai

matjam suku dan keturunan, disamping mengenal ratusan „bahasa daerah". Usaha mempertjepat proses integrasi bangsa untuk mentjapai satu „nation", jang bebas dari prasangka keturunan (racial prejudices) dan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, memerlukan waktu dan keuletan berdjuang.

„Dilapangan perundang-undangan sekarang sudah ditjapai berbagai kemadjuan dengan adanja ratifikasi perdjandjian penjelesaian dwi-kewarga-negaraan, dengan adanja undang² kewarga-negaraan Republik Indonesia dan undang² wadjib militer.

„Tetapi dengan adanja undang² ini sadja belum tertjapai tjita² perdjuangan kemerdekaan nasional.

„Kita masih menghadapi masalah pembangunan masjarakat jang adil dan makmur, sesuai dengan kepribadian Rakjat Indonesia sendiri. Dengan terlaksananja pembangunan masjarakat jang adil dan makmur ini, Insja Allah akan terlaksanalah tjita² membangun „nation", dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan.

„Dalam hubungan ini patut sekali diperhatikan, bahwa ditindjau dari sudut ekonomi, masalah golongan ketjil (minority problem) bagi negeri seperti Indonesia kita ini, sesungguhnja adalah satu masalah menghapuskan sifat² „under-developed" dan mentjapai „full employment". Dengan demikian penjelesaian bukanlah dengan djalan mengadakan diskriminasi rasial atau main asli-aslian, melainkan dengan djalan memikirkan dan melaksanakan pembangunan setjara besar-besaran dengan mengerahkan seluruh kemampuan jang ada, baik berupa „technical know how", „managerial skill" dan modal jang tersedia di Indonesia, djuga dari kalangan² golongan ketjil, sambil memperhatikan bagaimana si ekonomis lemah terhadap si ekonomis kuat. Soalnja jalah : Bagaimana meratakan kesedjahteraan !

„Mengingat hal ini, maka saja doakan semoga Kongres Baperki akan memberi sokongan sekuat kemampuan organisasinja untuk melaksanakan pembangunan setjara besar-

besaran dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin jang setjara tegas menudju kearah tertjapainja masjarakat adil dan makmur !"

Demikianlah bunji amanat Presiden Soekarno, jang sedari Kongres Baperki di Solo telah mendjadi landasan bagi Baperki untuk merumuskan program perdjuangan dan program kerdja Baperki. Bunji amanat Presiden Soekarno itu lagi pula telah membenarkan garis perdjuangan jang dianut selama itu oleh Baperki, jang berdasarkan kongres di Surabaja satu tahun jang lebih dahulu dari kongres di Solo telah menegaskan, bahwa penjelesaian masalah golongan ketjil di Indonesia hanja dapat diselesaikan dengan mempertjepat pembangunan masjarakat Pantja Sila, jang melaksanakan semangat Bhinneka Tunggal Ika, jang mendjamin penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan bagi tiap orang warga-negara.

Berdasarkan putusan Kongres Baperki di Surabaja itu, Baperki sudah mulai merumuskan program kerdjanja, jang lebih mengutamakan usaha², jang menguntungkan perkembangan pembangunan masjarakat Pantja Sila, jang mendjamin pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika dengan mewudjudkan adanja rasa harga sama antara semua orang warga-negaranja dengan sikap toleran terhadap kenjataan adanja perbedaan golongan² ethnik dan perbedaan golongan agama.

Setelah kongres di Solo dengan menerima setjara serta-merta garis Presiden Soekarno, seperti jang dirumuskan dalam amanatnja itu, Baperki lebih mempertegas sifat nasionalnja dan tegas memilih fihak Rakjat Indonesia jang berdjuang untuk mempertjepat terwudjudnja masjarakat adil dan makmur, jang berarti terlaksananja tjita² membangun „nation", dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan.

Memang, Baperki belum pernah sedari didirikannja merupakan organisasi jang bersifat exclusief, karena Baperki dalam perdjuangannja tidak pernah mengutamakan kepentingan suatu golongan setjara chusus dengan hanja menen-

tang praktek² diskriminasi rasial jang bersifat negatief, tetapi selalu meletakkan titik-berat perdjuangannja pada usaha mempertjepat terwudjudnja „nation" sesuai dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945 jang tegas positief. Karena Baperki jakin, bahwa dengan terwudjudnja „nation" sesuai dengan djiwa proklamasi itu, pasti dengan sendirinja lenjap praktek² diskriminasi rasial.

Dengan memperhatikan semua kenjataan ini, maka terasalah bahwa Baperki selama ini tidak pernah meninggalkan rel aslinja, tetap setia pada tudjuan aslinja dan tetap pada garis perdjuangan aslinja. Jang berkembang jalah ketegasan rumusan dari garis perdjuangan aslinja itu, jaitu sebagai berikut :

Ketika didirikan Baperki dengan tegas menjatakan memperdjuangkan terwudjudnja „nation" sesuai dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam kongresnja di Surabaja „nation" dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945 itu dirumuskan sebagai „terwudjudnja masjarakat Pantja Sila jang mewudjudkan pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika".

Dalam kongresnja di Solo, jang menerima serta-merta garis Presiden Soekarno, maka rumusan masjarakat Pantja Sila, jang mewudjudkan pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika, dirumuskan mendjadi masjarakat adil dan makmur, jang melaksanakan tjita² membangun „nation", dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan. Untuk mentjapai ini kita harus menghapuskan sifat² „underdeveloped" dan mentjapai „full employment". Djadi bukan dengan djalan mengadakan diskriminasi rasial atau main asli-aslian, melainkan dengan djalan mengerahkan seluruh kemampuan jang ada didalam negeri.

Dalam kongresnja di Djakarta dan Semarang, setelah Presiden Soekarno mengumumkan dekrit 5 Djuli 1959 untuk berlakunja sah kembali UUD 1945 dan setelah kita mengenal adanja Manifesto Politik 17-8-1959, maka rumusan masjarakat adil dan makmur, jang tidak mengenal lagi sifat²

„under-developed" dan mentjapai „full employment", pun mendjadi turut tambah tegas dengan kemadjuan perkembangan politik didalam negeri kita sendiri, jaitu mendjadi masjarakat sosialis, jang bersih daripada „exploitation de l'homme par l'homme". Untuk keperluan ini harus diperdjuangkan adanja pengerahan funds & forces progressif sampai pada tingkat paling maximum.

Sedikit sedjarah perkembangan rumusan, jang pernah dialami oleh Baperki ini membuktikan setjara lebih tegas, bahwa Baperki adalah organisasi nasional, jang selalu menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan jang manapun sadja. Baperki sedari didirikan selalu berpendirian, bahwa kepentingan golongan ketjil atau penjelesaian masalah minority, wadjib diperdjuangkan bukan dengan djalan menondjol-nondjolkan kepentingan golongan ketjil (minority), melainkan dengan djalan memperdjuangkan setjara lebih sungguh² dan setjara lebih sistematis pewudjudan „nation" berdasarkan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945; dengan pembangunan masjarakat „Pantja Sila" jang mewudjudkan pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika; dengan terlaksananja „nation-building" jang mewudjudkan masjarakat adil dan makmur, jang bersih dari sifat² „under-developed" dan mentjapai „full employment"; dengan memperlantjar proses menudju kemasjarakat sosialis, jang bersih daripada exploitation de l'homme par l'homme.

Dengan demikian mendjadilah djelas djuga, bahwa sedari didirikan, Baperki merupakan salah satu alat revolusi untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat dan selama ini dari sedjarah perkembangannja berusaha mendjadi alat revolusi jang effektif.

Hal ini ternjata dari kenjataan, bahwa Baperki selalu mengikuti djedjak kemadjuan revolusi kita dengan seksama dan mengikuti irama kemadjuan dengan baik.

Baperki malahan adalah salah satu organisasi pertama jang menjatakan diri mendjadi anggota Front Nasional untuk membantu berusaha melaksanakan „samenbundeling van alle revolutionaire krachten" dan Baperki tanpa ragu² siap sedia mendjalankan segala tugas revolusi jang mendjadi bebannja

untuk memperlantjar proses menudju kemasjarakat sosialis dan mendjamin pelaksanaan tiga kerangka revolusi Indonesia.

Seperti kita semua masih ingat, ketika kita menghadapi pelaksanaan Trikora dalam menghadapi kemungkinan adu kekuatan dengan pendjadjah Belanda, tidak sedikit massa Baperki telah mendaftarkan diri sebagai sukarelawan dan malahan ada djuga anggota Baperki jang telah memperoleh dan mendjalankan tugas digaris depan. Pun dalam rangka mempersiapkan kader² pembangunan untuk Irian-Barat, Baperki ikut serta aktif sebagai organisasi massa anggota Front Nasional. Malahan salah seorang kader wanita Baperki, jaitu Saudari Nona Effie Tjoa, telah mendaftarkan diri dan telah ikut serta dalam kursus² kader pembangunan untuk Irian-Barat, jang diselenggarakan oleh Front Nasional Pusat pada tingkat Pusat.

Perkembangan ini disebabkan, karena Baperki sebagai organisasi massa memang mendukung dan menjetudjui penuh pernjataan Presiden Soekarno dalam Resopim, jang menegaskan : „ ..... melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat adalah berarti setia dan taat kepada Proklamasi. Mengerti Amanat Penderitaan Rakjat berarti mempunjai orientasi jang tepat terhadap Rakjat. Bukan Rakjat sebagai kuda tunggangan, tetapi Rakjat sebagai satu-satunja jang berdaulat di Republik Proklamasi, sebagai tertulis didalam Pembukaan UUD 1945. Menerima Amanat Penderitaan Rakjat berarti; mentjintai Rakjat, memperhatikan kepentingan² Rakjat, mendahulukan kepentingan Rakjat daripada kepentingan diri sendiri, atau kepentingan kantong sendiri, atau kepentingan pundi-pundinja sendiri!"

Mempertinggi kewaspadaan nasional revolusioner.

Sebagai organisasi massa nasional, jang berusaha menjediakan diri sebagai salah satu alat revolusi untuk memperdjuangkan tiga kerangka revolusi mentjapai masjarakat sosialis, maka dengan sendirinja dalam perkembangannja Baperki sebagai organisasi massa nasional itu wadjib ikut

serta membantu mempertinggi kewaspadaan nasional jang revolusioner. Kewaspadaan nasional jang ditudjukan untuk mendjamin kelantjaran langsungnja revolusi kita melaksanakan tiga kerangka revolusi seperti dirumuskan dalam Manifesto Politik.

Dalam usaha mempertinggi kewaspadaan nasional jang revolusioner itu, tentu sadja pertama-tama kita perlu sekali memperhatikan tjanang, sinjalemen Presiden Soekarno, seperti dikemukakan dalam Resopim. Tjanang itu adalah sebagai berikut :

„Ada pula pemimpin², jang menjerukan kepada Rakjat, supaja Rakjat „awas-awaslah terhadap orang² jang memakai Manipol, Djarek, Usdek dan Amanat Penderitaan Rakjat, hanja sebagai **merk** sadja", tetapi kenjataannja mereka sendirilah mendahulukan kepentingan dewek. Hai Rakjat, awas terhadap „pemimpin²" jang demikian itu ! Tidak semua „ketjap nomor satu" adalah benar² nomor satu ! Banjak jang tiruan, bung, banjak jang palsu !

„Dwi-tunggal Proklamasi dan UUD 1945 ! Alangkah hebatnja, alangkah mengagumkannja.

„Memang selalu saja dengung-dengungkan, bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi jang „unik" — satu revolusi jang „lain daripada jang lain". Selalu saja katakan, bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi multicomplex, revolusi Pantja-Muka, revolusi jang „a summing up of many revolutions in one generation". Sudah barang tentu pada waktu itu banjak golongan diluar negeri mengatakan, bahwa saja ini „a little confused", — sedikit bingung, barangkali sedikit tidak waras otak. Tetapi didalam negeri pun saja pada waktu itu „kena tjap". Sebagian dari kaum intelek kita, jaitu golongan intelek jang saja namakan kaum cynici, atau golongan intelek jang tidak mempunjai kesadaran politik, tidak mempunjai „politiek bewustzijn" — mereka kadang² saja namakan „politiek bewusteloozen" — mengatakan, bahwa perkataan saja tadi „omong kosong" belaka atau „ngawur !" Ada djuga jang mengatakan bahwa saja ini seorang „demagog", dan ada pula jang menjebutkan saja seorang „fraseolog", jang pandai memakai perkataan² muluk² seperti

„unik", „multicomplex", „pantjamuka" dan lain sebagainja itu. Tapi jang paling menjedihkan ialah adanja pada waktu itu kaum intelek-cynici jang mengatakan, bahwa saja **membelokkan** revolusi Indonesia kearah „kiri", kearah Rakjat djembel, kearah „complex-complexan", kearah „APR-APR-an" dan lain sebagainja. (APR = Amanat Penderitaan Rakjat). Mereka, kaum cynici ini, rupanja tidak pernah memperhatikan benar² isi dan arti Pembukaan UUD 1945 ! Mereka rupanja tidak mengerti, bahwa revolusi kita ini memang **sedari asal-mulanja „Revolusi Kiri"**, revolusi Rakjat, revolusi A.P.R. !" (Resopim penerbitan Dep. Pen. Pagina 9-10).

Selandjutnja dalam amanat „Tahun Kemenangan", Presiden Soekarno mengemukakan tjanang sebagai berikut :

„Masih terlalu banjak instruksi² dan tindakan² Presiden jang ditudjukan untuk mobilisasi, mempersatukan dan mengikut-sertakan kekuatan² Rakjat jang revolusioner, tidak dilaksanakan dengan sungguh², atau malahan diam² kadang² „didjegal" atau „disrimpung" oleh alat² negara sendiri. Satu tjontoh sadja misalnja mengenai pengerahan dan pemersatuan Rakjat melalui Front Nasional. Pekerdjaan Front Nasional sekarang ini kadang² digerowoti dan dipetjah-belah oleh orang² jang masih menderita sesuatu phobi. Malahan masih ada satu daerah, jang disitu itu belum dapat dibentuk Front Nasional daerah, karena adanja orang² jang komunisto-phobi !"

Dibagian lain dari amanat „Tahun Kemenangan" itu, Presiden Soekarno mentjanangkan sebagai berikut :

„Kewadjiban kita ialah harus terus-bersatu-padu dan terus bergotong-rojong sambil memegang teguh Manipol-Usdek dan Resopim itu, dan memperluas dan memperdalam pelaksanaan Manipol-Usdek dan Resopim itu.

„Mengenai ini saja memperingatkan kepada satu hal jang kita harus waspada : Jaitu, kepada adanja orang² jang dalam perkataan mengikuti Manipol-Usdek dan Resopim, akan tetapi dalam prakteknja bertentangan dengan Manipol-Usdek dan Resopim. Waspadalah terhadap orang² jang demikian itu ! Waspadalah ! Sebab djikalau tidak, maka nanti **mudah tumbuh pengrongrongan revolusi dari dalam.**

„Djagalah supaja revolusi kita ini tetap murni dan segar !"

Demikianlah berbagai tjanang, jang telah dikemukakan oleh Presiden Soekarno didalam Resopim dan didalam amanat „Tahun Kemenangan".

Dengan memperhatikan dengan seksama tjanang² jang diberikan oleh Presiden Soekarno, maka mendjadilah djelas bagi massa Baperki, apa sebab dalam perdjuangan Baperki melaksanakan program perdjuangan dan program kerdja, jang berlandaskan garis Presiden Soekarno mengenai masalah golongan ketjil, Manipol dan Resopim, seringkali menghadapi berbagai hal jang terasa gandjil dan membingungkan. Sekarang kita memperoleh ketegasan dari Presien Soekarno sendiri, bahwa „masih terlalu banjak instruksi dan tindakan² Presiden, jang ditudjukan untuk mobilisasi, mempersatukan dan mengikut-sertakan kekuatan² Rakjat jang revolusioner, tidak dilaksanakan dengan sungguh² atau malahan diam² kadang² „didjegal" atau „disrimpung" oleh alat² negara sendiri".

Dengan demikian pun mendjadilah djelas djuga, bahwa Baperki sebagai organisasi massa, jang menjediakan diri untuk mendjadi salah satu alat-revolusi, djadi wadjib tetap berusaha untuk membantu „mendjaga supaja Revolusi kita tetap murni dan segar", jaitu dengan djalan jang telah ditundjukkan dalam amanat „Tahun Kemenangan", jaitu :

1. Harus terus bersatu-padu dan terus bergotong-rojong sambil memegang teguh Manipol-Usdek dan Resopim.
2. Harus memperluas dan memperdalam pelaksanaan Manipol-Usdek dan Resopim.
3. Harus mempertinggi kewaspadaan terhadap orang² jang dalam perkataan mengikuti Manipol-Usdek-Resopim, tetapi didalam praktek bertentangan dengan Manipol-Usdek dan Resopim. Kewaspadaan dipertinggi untuk mentjegah pengrongrongan Revolusi dari dalam.
4. Harus ulet, tahan udji setjara revolusioner dalam usaha mengatasi kesulitan² jang dihadapi dalam usaha membantu mendjaga, supaja Revolusi kita tetap murni dan segar.

5. Harus bekerdja lebih keras untuk membantu melenjapkan komunisto-phobi, sehingga Front Nasional betul² merupakan alat pemersatuan tenaga Rakjat revolusioner jang effektif.

Untuk dapat melaksanakan 5 matjam „harus" ini, terasalah, bahwa pelaksanaan indoktrinasi tentang Pantja Sila, Manifesto Politik dan semua Pedoman² Pelaksanaannja serta Resopim, amanat „Tahun Kemenangan" dan sedjarah pembentukan „Baperki" sebagai organisasi massa dan alat-revolusi, perlu sekali dilaksanakan setjara lebih intensif daripada selama ini. Dalam hubungan dengan ini, patut djuga diperhatikan, bahwa indoktrinasi itu meliputi djuga 9 matjam pokok, seperti diperintji dalam amanat „Tahun Kemenangan", jakni :

1. Mengenai Revolusi.
2. Mengenai Pantja Sila Progressivisme.
3. Kepribadian Indonesia, jang berpusat kepada gotong-rojong, musjawarah & mufakat.
4. Persatuan Nasional Revolusioner dengan Front Nasional.
5. Membrantas komunisto-phobi.
6. Mutlaknja poros Nasakom.
7. Djahatnja liberalisme.
8. Satu pimpinan.
9. Sosialisme.

Apa sebab tidak turut mendukung aliran „assimilasi total" & gerakan ganti nama ?

Dalam rangka melaksanakan tugas Resopim dan amanat „Tahun Kemenangan" untuk mempertinggi kewaspadaan nasional guna mendjaga supaja Revolusi kita tetap murni dan segar, Baperki telah memperhatikan dan mengikuti dengan kritis gerakan dan usaha sementara orang, jang diumumkan sebagai gerakan „assimilasi total" dan jang menampakkan diri dalam bentuk andjuran ganti nama.

Tentu sadja timbullah pertanjaan : Bagaimana hasil tindjauan kritis Baperki itu ?

Pertama-tama dapat dikemukakan, bahwa dalam memperhatikan perkembangan sedjarah pembentukan „national state" didunia ini, maka kita akan melihat kenjataan, bahwa di Eropa Barat, dimana kapitalisme tumbuh setjara sangat pesat sekali dan lalu mendjadi pusat imperialisme, disanalah negara² itu umumnja berbentuk „mono national state". Sekalipun terdapat suku, tetapi tidak ada golongan jang dinamakan „national minorities". Di Eropa Timur sebaliknja kita mengenal „multi national states", karena lambatnja pertumbuhan kapitalisme dalam masa peralihan feodalisme ke kapitalisme.

Di praktis semua negara, jang sebelum perang dunia kedua mendjadi djadjahan negeri² Eropa Barat, dan setelah perang dunia kedua memproklamasikan kemerdekaannja, kita melihat pembentukan „national state" jang mengenal didalamnja banjak djenis golongan ketjil, karena masjarakatnja mengandung banjak matjam golongan ethnik, disamping mengandung banjak matjam golongan agama.

Beda daripada nasionalisme Eropa Barat, jang mendjadi motor pendjadjahan dan imperialisme, nasionalisme diwilajah A-A-A, ternjata adalah nasionalisme jang bangkit dan tumbuh dalam perdjuangan menentang kolonialisme, menentang imperialisme, menentang rasialisme dan menentang chauvinisme. Dalam hubungan ini tentu baik sekali lagi kita perhatikan tjiri² jang harus dipenuhi oleh seorang patriot komplit, seperti jang didjelaskan oleh Presiden Soekarno depan para mahasiswa Indonesia di Djepang. Tjiri² itu adalah :

1. Tjinta kemerdekaan Tanah Air dengan kedaulatan penuh dalam tangan Rakjat Indonesia sendiri.
2. Tjinta kebebasan ekonomi nasional, jang mendjamin kemakmuran adil bagi tiap orang warga-negara.
3. Tjinta kebudajaan sendiri, jang menolak pengaruh² buruk kebudajaan Asing.
4. Sanggup memperdjuangkan setjara gigih penjelesaian

revolusi sehingga terwudjud masjarakat sosialis Indonesia.

5. Tegas anti-chauvinisme, anti-rasialisme menudju ke brotherhood of man.

Disamping semua ini, kita pun menghadapi kenjataan jang welo², jang djelas sedjelas-djelasnja, bahwa Amerika Serikat, jang mendjalankan politik „melting pot" atau „kantjah lebur", karena hendak melebur semua golongan ethnik jang berlainan untuk merupakan satu djenis golongan ethnik baru, hanja tidak dipaksakan, melainkan setjara sukarela, ternjata sehingga kini setelah merdeka 186 tahun lamanja belum berhasil menjelesaikan apa jang dikenal sebagai „negro problem". Bahkan „negro problem" itu pada achir² ini masih dapat meletus mendjadi kekatjauan main kepruk dan membunuh orang² warga-negara Amerika Serikat dari golongan ethnik Negro jang ingin memperoleh kedudukan sebagai warga-negara A.S. setjara penuh.

Sebaliknja kita melihat, bahwa pelaksanaan sistem sosialisme, jang mengachiri „exploitation de l'homme par l'homme" di Uni Sovjet, di-negeri² sosialis Eropa Timur dan di RRT, ternjata dapat berhasil dalam tempo belasan tahun sadja mengachiri timbulnja persoalan golongan ketjil. Negeri² tsb tetap mengenal banjak matjam golongan ethnik besar dan ketjil, tetapi tidak pernah mengalami timbulnja persoalan golongan ketjil jang menarik perhatian dunia lagi.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa dalam masjarakat jang mengenal berbagai matjam golongan ethnik, dilaksanakannja dan terwudjudnja masjarakat sosialis akan mengachiri persoalan² golongan ketjil. Masjarakat sosialis jang mengachiri sistim exploitation de l'homme par l'homme tentu tidak akan mengenal lagi masalah golongan ketjil, jang biasanja timbul karena berlakunja sistim penindasan manusia oleh manusia.

Ini adalah kenjataan² jang kita lihat dalam mempeladjari perkembangan usaha menjelesaikan masalah minority didunia kita ini. Kenjataan ini menimbulkan kesimpulan, bahwa jang penting **bukanlah** „assimilasi total" atau „peleburan total" atau „ganti nama" untuk mentjapai penjelesaian masalah

golongan ketjil, untuk mentjapai rasa sama harga antara semua warga-negara Indonesia dari golongan ethnik manapun djuga, **melainkan** memperhebat gotong-rojong untuk mempertjepat terwudjudnja Amanat Penderitaan Rakjat, terwudjudnja masjarakat sosialis, jang mengachiri exploitation de l'homme par l'homme !

Walaupun kesimpulan diatas ini mestinja tjukup djelas bagi semua orang, tetapi kita pun harus menghadapi kenjataan, seperti jang disinjalir oleh Presiden Soekarno, jaitu dalam amanat „Tahun Kemenangan" bahwa „Pekerdjaan Front Nasional sekarang ini kadang² digerowoti dan dipetjah-belah oleh orang² jang masih menderita sesuatu phobi". Phobi itu adalah komunisto-phobi ! Disamping ini tentu kita mesti menerima djuga sebagai kenjataan, bahwa dalam masjarakat kita masih ada djuga orang² jang dalam perkataan mengikuti Manipol-Usdek dan Resopim, tetapi dalam prakteknja bertentangan dengan Manipol-Usdek dan Resopim.

Timbullah persoalan : Sikap apakah jang wadjib diambil oleh Baperki sebagai organisasi massa dan alat-revolusi ?

Seperti diterangkan diatas, Baperki telah menerima dengan suara bulat garis Presiden Soekarno tentang penjelesaian masalah minority seperti dirumuskan dalam amanatnja pada Kongres Baperki di Solo. Program perdjuangan dan program kerdja Baperki dengan sendirinja harus berlandaskan garis Presiden Soekarno itu.

Apabila kita bandingkan kesimpulan seperti dirumuskan diatas, jaitu bahwa tertjapainja masjarakat sosialis, jang mengachiri exploitation de l'homme par l'homme akan mengachiri persoalan minority, dengan garis Presiden Soekarno, maka didapatlah kenjataan, bahwa menurut amanat Presiden Soekarno itu „terlaksananja pembangunan masjarakat jang adil dan makmur ini, Insja Allah akan terlaksanalah tjita² membangun „nation", dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianaktirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan". Karena masjarakat adil dan makmur itu sekarang sudah djelas adalah masjarakat sosialis, jang mengachiri sistim exploitation de l'homme

par l'homme, maka garis Presiden Soekarno djadi memperkuat kesimpulan jang ditarik dari mempeladjari perkembangan masjarakat bangsa² didunia kita ini.

Seperti ditegaskan oleh amanat Presiden itu ,,ditindjau dari sudut ekonomi masalah golongan ketjil (minority problem) bagi negeri seperti Indonesia kita ini, sesungguhnja adalah satu masalah menghapuskan sifat² ,,under-developed" dan mentjapai ,,full employment", sehingga dengan demikian penjelesaian bukanlah dengan djalan mengadakan diskriminasi rasial atau main asli-aslian, melainkan dengan djalan memikirkan dan melaksanakan pembangunan setjara besar-besaran dengan mengerahkan seluruh kemampuan jang ada, baik berupa ,,technical skill" dan ,,managerial know how" dan modal jang tersedia di Indonesia".

Oleh karenanja tugas Baperki dalam melaksanakan garis Presiden Soekarno itu adalah berusaha memperkokoh kesadaran, terutama dikalangan keturunan asing, bahwa untuk mentjapai penghargaan sama, untuk mentjegah berlangsungnja sistim anak-tiri dan anak-emas antara warga-negara Indonesia, jang terpenting jalah melaksanakan pengerahan, memobilisasi seluruh potensi jang ada setjara paling maximal, berupa technical skill, managerial know-how dan modal, djuga dari golongan keturunan asing, sehingga dapat diperlantjar proses mentjapai masjarakat sosialis, jang bersih dari sistim penindasan manusia oleh manusia. Praktek² diskriminasi rasial pada hakekatnja bersumber pada napsu iri-hati dan untuk melaksanakan penindasan manusia oleh manusia.

Berhasilnja usaha Baperki ini tentu menguntungkan proses revolusi kita menudju kemasjarakat adil dan makmur, jang bebas dari sifat² ,,under-developed" dan jang mentjapai ,,full employment", djadi menguntungkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat setjara sesungguhnja !

Jang dirugikan oleh usaha Baperki ini hanja musuh² revolusi Indonesia, tukang² tjatut Amanat Penderitaan Rakjat dan koruptor² Manipol-Usdek dan Resopim.

Selandjutnja, apabila kita perhatikan tingkat perkembangan revolusi kita sekarang ini jang bersifat nasional-demokratis, maka terasalah, bahwa kita semua memang harus

berusaha sekeras-kerasnja untuk memperkokoh persatuan segala kekuatan revolusioner dengan poros Nasakom. Dalam melaksanakan tugas revolusi ini kita semua berkewadjiban untuk memperkokoh dan meratakan kesadaran tentang tudjuan dan tugas revolusi jang bersifat nasional-demokratis untuk kemudian meningkat mentjapai Indonesia ber-sosialis Indonesia, bersih dari exploitation de l'homme par l'homme. Dengan memperhatikan ketegasan dalam Djarek, bahwa tahap mentjapai Indonesia ber-sosialis Indonesia, bersih dari exploitation de l'homme par l'homme baru bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama, jaitu tahap nasional-demokratis diselesaikan seluruhnja.

Djadi dalam tahap revolusi jang sekarang ini kita perlu menggalang terkonsentrasinja seluruh kekuatan nasional. Ini tentu harus ditjapai dengan mendjauhkan sebanjak mungkin persoalan jang kurang perlu. Persoalan „assimilasi total" dengan bentuknja „mengandjurkan ganti nama", pasti merupakan persoalan, jang memetjah belah terpusatnja pikiran dalam pengerahan seluruh funds & forces progressif, tanpa ada perlunja.

Hal ini kita akan rasakan setjara lebih njata pula, apabila kita perhatikan bahwa untuk mentjapai konsentrasi seluruh kekuatan nasional revolusioner, jang penting **bukanlah** „assimilasi total" atau „peleburan total" dari semua golongan ethnik dan golongan agama jang ada di Indonesia untuk mentjapai satu matjam djenis golongan ethnik dan golongan agama baru. Hal ini ternjata setjara tidak terbantah lagi kebenarannja, apabila kita perhatikan kenjataan, bahwa orang² jang dinamakan „asli", djadi bukan „produk assimilasi" bisa mendjadi pengchianat revolusi, bisa mendjadi kekuatan kontra revolusioner. Dalam revolusi kita sendiri, kita menghadapi kenjataan, bahwa orang² seperti Kartosuwirjo, Assaat, Natsir, Sjafrudin, Sumitro dll-nja lagi telah memimpin pemberontakan kontra-revolusioner. Djadi „keaslian" dan „assimilasi total" untuk mentjapai „taraf asli" **bukanlah** sjarat untuk mendjadikan seorang kekuatan nasional revolusioner pendukung Manipol-Usdek dan Resopim

jang sedjati. Dengan sendirinja „nama" atau „suara nama" tidak merupakan sjarat untuk menentukan, apakah seorang bisa mendjadi kekuatan nasional revolusioner untuk mentjapai masjarakat sosialis.

Jang harus dikerdjakan adalah indoktrinasi jang lebih effektif, jang melaksanakan mental retooling setjara sedemikian rupa, sehingga tiap warga-negara, tanpa memandang asal keturunannja dan golongan ethnik atau agamanja, sadar dan jakin akan tudjuan revolusi kita dan sadar pula, bahwa tertjapainja tudjuan revolusi itu akan mendjamin kebahagiaan hidup jang sempurna bagi dirinja dan anak-tjutjunja. Adanja kesadaran dan kejakinan demikian itu jang merata akan mendjamin suksesnja pengerahan funds & forces progressif jang mendjadi tugas revolusi kita pada tingkat revolusi kita sekarang ini.

Berdasarkan alasan² diatas itu, maka Baperki dengan sendirinja tidak dapat mendukung gerakan „assimilasi total" dan tidak dapat menjetudjui „andjuran ganti nama". Apalagi gerakan itu dapat menjelewengkan perhatian massa keturunan asing, jang djustru wadjib kita bimbing untuk turut dikerahkan dalam penggalangan konsentrasi seluruh kekuatan revolusioner menudju kemasjarakat sosialis berdasarkan Pantja Sila.

Nasakom pun tegas menentang benih rasialisme !

Dalam tahun² permulaan berdirinja Baperki dapat dikatakan seolah-olah praktis berdiri sendirian didalam usaha mempertegas, bahwa nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme jang anti-rasialisme, anti-chauvinisme, karena nasionalisme Pantja Sila menentang kolonialisme dan menghendaki penghapusan imperialisme, terutama dalam menghadapi praktek² diskriminasi rasial sebagai akibat penjelewengan² dibidang ekonomi, jang achirnja mentjiptakan situasi untuk kembali ke UUD 1945.

Setelah kita berdiri atas landasan Manipol-Usdek dan Resopim, keadaan turut berubah. Berubah karena lebih meratanja kesadaran tentang tugas revolusi Indonesia, ten-

tang kekuatan² pokok pendukung revolusi Indonesia dan tentang tudjuan revolusi Indonesia. Mendjadi djelasnja tiga kerangka revolusi Indonesia didalam Manifesto Politik membantu banjak untuk mentjegah penjelewengan dan untuk mengadakan koreksi terhadap penjakit² kanak² revolusi.

Baperki dalam perdjuangannja untuk melaksanakan tjita²-nja pun tidak perlu merasa berdiri sendiri lagi. Memang, Baperki tidak berdiri sendiri, apalagi setelah Baperki mendjadi organisasi-anggota Front Nasional.

Usaha memperdjelas, bahwa nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme jang anti-rasialisme, anti-chauvinisme, karena nasionalisme Indonesia bangkit dan tumbuh dalam perdjuangan menentang kolonialisme dan perdjuangan melikwidasi imperialisme, sekarang dilakukan oleh tokoh² Nasakom.

Seperti diketahui, Ali Sastroamidjojo S.H. sebagai tokoh nomor satu PNI, jang pernah mendjadi Ketua Konperensi A-A Pertama di Bandung sering mendjelaskan tentang nasionalisme Pantja Sila jang anti-rasialisme, anti-chauvinisme, karena menentang kolonialisme dan berusaha mentjiptakan dan memperkokoh setiakawan A-A jang menghendaki hapusnja kolonialisme dari muka bumi A-A.

Dalam kuliah umum didepan mahasiswa Baperki diaula Universitas Baperki, Ali Sastroamidjojo S.H. malahan djuga mempertegas, bahwa soal memilih nama adalah soal pribadi. Suara nama djuga tidak menentukan, apakah seorang patriot Indonesia sedjati atau bukan, karena Kartosuwirjo, Sumitro dll-nja ternjata adalah pemberontak jang hendak merubuhkan Republik Indonesia, jang kita semua tjintai.

Lain tokoh aliran nasionalisme, jang dengan tegas menentang berseminja rasialisme dan memandang andjuran ganti nama merupakan bentuk daripada rasialisme, adalah Asmara Hadi dan A. M. Hanafi dari Pantindo.

Andjuran ganti nama setjara sukarela, jang didalam praktek dirasakan mengandung unsur „paksaan" ditjela dalam sebuah statement resmi Partindo dan dinjatakan menimbulkan „bottle-neck" jang merugikan usaha penge-

rahan funds & forces progressif sampai pada tingkat paling maximum.

Pendirian tokoh² agama mestinja tidak perlu disangsikan lagi, karena agama tidak mengenal batas rasial. Disamping itu dinegara kita ini, kita kenal banjak golongan agama, jang merupakan „minority" dan pelaksanaan ide „assimilasi total" dikalangan agama tentu tidak bisa tidak membawa akibat peleburan diri golongan² agama ketjil pada golongan agama jang besar setjara mutlak. Pikiran ini tentu tidak sesuai dengan sila : Ketuhanan Jang Maha Esa, jang mendjadi alat-pemersatu jang sama kuatnja seperti sila² lain, karena Pantja Sila sebagai keseluruhan harus merupakan alat-pemersatu jang kokoh dan tahan udji.

Sila Ketuhanan Jang Maha Esa sebagai alat-pemersatu menghendaki toleransi terhadap perbedaan agama. Memang, dalam mengutamakan persatuan, kita harus mempunjai djiwa toleran terhadap perbedaan², termasuk perbedaan asal keturunan atau perbedaan golongan ethnik, sehingga perbedaan ini tidak merugikan usaha pemersatuan !

Pendirian ini dikemukakan setjara tegas oleh Menteri/ Sekdjen PB Front Nasional, Saudara Sudibjo, jang mentjanangkan, bahwa usaha kaum imperialis memang hendak mentjiptakan petjah-belah dengan djalan apapun sadja dan untuk menjelewengkan perhatian massa pada sasaran tombak revolusi. Kaum imperialis dan kaki-tangannja tidak segan² untuk mengemukakan persoalan² „ganti nama", asal sadja dapat menimbulkan perpetjahan. Front Nasional didirikan untuk mempertinggi kewaspadaan terhadap segala siasat divide et impera hingga ditjapai persatuan seluruh kekuatan nasional jang kompak dan sanggup melikwidasi imperialisme menudju kemasjarakat sosialis.

Dalam kata sambutannja pada Pekan Karya Peladjar Baperki, Saudara Menteri/Sekdjen PB Front Nasional, Sudibjo dengan tegas menjatakan, bahwa suara nama tidak mendjadi persoalan dan dalam usaha membina konsentrasi seluruh kekuatan nasional asal keturunan pun tidak mendjadi persoalan.

Sedang dalam sambutannja tertulis pada peringatan Dies Natalis Ke-3 Universitas Baperki, Saudara Sudibjo sebagai Menteri/Sekdjen PB Front Nasional mempertegas, bahwa nasionalisme Pantja Sila adalah anti-rasialisme, anti-chauvinisme, karena sama halnja dengan nasionalisme Tiongkok seperti didjelaskan oleh Dr. Sun Yat Sen, nasionalisme Pantja Sila tumbuh dalam perdjuangan menentang kolonialisme dan menentang imperialisme. Nasionalisme Pantja Sila menghendaki setiakawan the new emerging forces jang kokoh untuk mempertjepat likwidasi imperialisme dan mentjapai masjarakat dunia baru, seperti didjelaskan dalam Manipol.

Seperti diketahui Saudara Sudibjo, disamping Menteri/Sekdjen PB Front Nasional adalah seorang tokoh agama Islam jang terkemuka dan pendapatnja dapat dikatakan adalah tjukup representatief untuk dikatakan mewakili pendapat aliran Agama, chususnja agama Islam.

Pun tokoh aliran Komunis, seperti D.N. Aidit, Ketua C.C. PKI dalam banjak pernjataannja mempertegas memperhebat perdjuangan menghapuskan rasialisme dan benih²nja. Dalam sambutannja pada Training Centre Gerwani, Saudara Aidit sebagai tokoh Nasakom, a.l. mempertegas berbagai pendapat, jaitu seperti terbatja dalam Harian Rakjat tgl 29-10-1962, sebagai berikut :

„Kaum reaksioner tidak suka persatuan nasional kita mendjadi kuat. Oleh karena itu mereka tidak henti-hentinja menimbulkan perpetjahan dalam persatuan nasional kita. Disamping me-njebar²kan komunisto-phobia, Rakjat-phobia, dsb, mereka berusaha untuk me-ngobar²kan rasialisme. Dalam rangka mendjilat imperialis Amerika Serikat, chususnja dalam rangka mendapat kredit dari negara besar itu, sebagaimana djuga tuan Nehru di India, kaum reaksioner dinegeri kita terus-menerus mentjari kesempatan untuk me-ngobar²kan semangat anti-Tionghoa dan mempertentangkan warga-negara „asli" dan „tidak asli".

„Tetapi untunglah perdjuangan bangsa Indonesia mempunjai tradisi jang baik dalam menentang rasialisme dan pembinaan nation Indonesia berdjalan bersama-sama dengan perdjuangan menentang rasialisme. Sedjak Indische Partij

tahun 1912 kita sudah berdjuang melawan rasialisme dan Bung Karno sendiri adalah tokoh terkemuka dalam perdjuangan melawan rasialisme.

„Bung Karno pernah dikritik oleh orang² chauvinist, ketika beliau memasukkan dua orang keturunan Tionghoa, jaitu Sdr. Kwee Kek Beng dan Dr. Kwa Tjoan Sioe kedalam redaksi madjalah „Suluh Indonesia Muda". Beliau menamakan kritik demikian itu sebagai pendirian orang jang „sempit budi", sebagai „katak dibawah tempurung".

„Tidak seperti kaum rasialis kita sekarang, Bung Karno pada waktu itu **tidak** mengandjurkan kepada Sdr. Kwee Kek Beng dan Dr. Kwa Tjoan Sioe untuk mengganti nama mereka dengan nama „asli" misalnja Badjigur atau Rudjak Sentul".

„Rasialisme jang mempersoalkan penggantian nama adalah rasialisme jang paling koprot, paling tidak masuk akal, paling tidak ilmiah dan dinegeri kita telah menimbulkan banjak lelutjon dan kesedihan".

Selandjutnja dipertegas djuga :

„Oleh karena itu kita harus terus memerangi rasialisme jang koprot itu. Bagi kita pasti masih lebih baik Drs. Khouw Bian Tie, anggota Staf Komando Operasi Ekonomi, jang namanja tidak „asli" daripada Kartosuwirjo bekas kepala gerombolan DI-TII, jang namanja „asli" atau dikira „asli".

„Sesuai dengan tradisi anti-rasialisme kita, jang sudah setengah abad lamanja, marilah kita teruskan pendjuangan melawan rasialisme, baik jang berbentuk purbasangka warna kulit, purbasangka keturunan maupun jang bentuknja paling rendah dan paling koprot, jaitu ganti nama, apalagi setjara paksa.

„Perdjuangan melawan rasialisme adalah perdjuangan untuk meniadakan kontradiksi jang tidak perlu dikalangan Rakjat dan ini berarti memperkuat persatuan nasional !"

Demikianlah pendapat² tokoh² terpenting dari Nasakom, jang membuktikan, bahwa Baperki dalam perdjuangannja selama ini bukan chusus melukiskan rasa hati golongan ketjil setjara exclusief, seperti dikira oleh setengah orang, melainkan ternjata melukiskan suara hati Rakjat terbanjak, jang

sedang berdjuang melikwidasi imperialisme menudju kearah terbentuknja masjarakat dunia baru, jang bersih dari kolonialisme, bersih dari imperialisme dan bersih dari penindasan manusia oleh manusia !

Seperti sudah sering didjelaskan, rasialisme adalah aliran, jang berpendirian, bahwa ketjakapan, kemampuan, dan kemadjuan seorang ditentukan oleh „ras"-nja. Aliran ini dengan sendirinja dapat mengakibatkan dua hal, jaitu membunuhi „ras" jang tidak disukai, karena merusak „ras" jang lain, jang dilakukan oleh Hitler dan merupakan perbuatan jang dikutuk oleh seluruh ummat manusia, atau berusaha „melenjapkan" golongan „ras" jang tidak disukai dengan djalan peleburan total atau assimilasi.

Dinegeri kita ternjata ada pengikut rasialisme, jang menganggap suara nama adalah tjiri „ras" jang tidak disukai, terutama nama suara Tionghoa atau asal Tionghoa, jang menimbulkan andjuran untuk mengganti nama setjara „sukarela". Rasialisme ini dinjatakan bentuk rasialisme paling koprot.

Rasialisme memang tidak ilmiah dan ketidak-ilmiahannja itu dibuktikan oleh empatbelas sardjana, jang diberi tugas oleh PBB untuk melakukan penjelidikan dan penelitian. Dalam buku-laporannja „Statement on Race" dipertegas, bahwa menurut hasil penelitian ilmiah terbukti njata, bahwa tiap orang tanpa dipengaruhi oleh asal „ras"-nja, dalam keadaan suasana hidup sama, dengan memperoleh kesempatan madju dan mengembangkan bakatnja setjara sama, pasti dapat mentjapai tingkat kemadjuan jang sama pula.

Berdasarkan hasil penelitian ilmiah jang membantah kebenaran rasialisme, Baperki pernah menentukan untuk memperdjuangkan suasana hidup sama, kesempatan madju sama dan kesempatan mengembangkan bakat sama bagi tiap orang warga-negara. Karena berdasarkan hasil penelitian ilmiah itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa tiap orang warga-negara, tanpa memandang asal keturunannja, dalam keadaan suasana hidup sama, kesempatan sama untuk madju dan mengembangkan rasa tjinta terhadap Tanah Air dan Rakjat Indonesia, pasti dapat mentjapai tingkat kemadjuan rasa

tjinta Tanah Air dan Rakjat Indonesia jang sama pula.

Djadi jang terpenting bukanlah „assimilasi total" untuk melenjapkan tjiri² „ras" tertentu atau „ganti nama", melainkan mentjiptakan suasana hidup jang sama, kesempatan sama untuk madju dan mengembangkan bakat kemampuannja. Hal ini memang tidak mungkin dalam masjarakat, dimana berlaku sistim penindasan manusia oleh manusia. Karena pelaksanaan sistim exploitation de l'homme par l'homme itu menjebabkan suasana hidup dan kesempatan madju jang berlainan bagi golongan jang menindas dan bagi golongan jang ditindas.

Hal ini perlu kita sadari betul² dan oleh karenanja kita perlu memperbulat tjita², bahwa hanja dengan terwudjudnja masjarakat adil dan makmur, jang tidak mengenal lagi sifat² „under-developed", jang mentjapai „full employment" atau masjarakat sosialis, jang bersih daripada exploitation de 'homme par l'homme, kita akan dapat mewudjudkan adanja keadaan suasana hidup sama, kesempatan sama untuk madju dan mengembangkan bakat bagi tiap orang warga-negara tanpa dipengaruhi oleh asal keturunannja atau golongan ethnik serta agamanja.

Garis ini telah ditarik dalam rapat pendirian Baperki 9 tahun jang lalu dan wadjib kita perdjuangkan pelaksanaannja setjara lebih hebat karena memperdjuangkan pelaksanaan garis itu ternjata memperdjuangkan pelaksanaan garis Presiden Soekarno, seperti diamanatkan pada Kongres Baperki di Solo, memperdjuangkan pelaksanaan Manipol-Usdek dan Resopim setjara lebih intensif dan sungguh².

Djadi dari meneliti beberapa hal penting, jang pernah kita putuskan untuk mendjadi landasan bagi rumusan program perdjuangan dan program kerdja Baperki, ternjata setjara lebih tegas lagi, bahwa Baperki madju terus melalui djalan Pantja Sila dengan Manipol sebagai kompasnja untuk memperlantjar proses menudju kemasjarakat sosialis, jang pasti mengachiri praktek² rasialisme dengan berachirnja sistim exploitation de l'homme par l'homme.

Baperki ikut aktif melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan".

Sekarang marilah kita tjoba menindjau tugas Baperki sebagai organisasi massa dan anggota Front Nasional dalam rangka pelaksanaan amanat „Tahun Kemenangan".

Kita semua tentunja telah mempeladjari isi amanat „Tahun Kemenangan" itu. Walaupun demikian ada manfaatnja untuk mengemukakan berbagai ketegasan jang dikemukakan dalam amanat „Tahun Kemenangan" itu.

Pertama-tama ketegasan, bahwa kita berhasil memasuki „Tahun Kemenangan" setelah kita berhasil mengachiri djaman penjelewengan dan menentukan landasan Manipol-Usdek dan Resopim dengan kemudi dan bimbingan ide sosialisme.

Dipertegas, bahwa „kita berdjalan terus atas Landasan Manipol-Usdek-Resopim! Dan landasan ini akan tertanam subur, akan tumbuh subur! Sekali landasan itu bermahkota dalam kalbunja Rakjat, sekali ia laksana Wahju Tjakraningrat bermahligai dalam api-djiwa Rakjat, maka Indonesia jang Djaja Raja, Indonesia jang Adil Makmur, akan mendjadilah kenjataan sampai achir djaman. Dan tidak akan ada satu kekuatan duniawipun jang akan dapat merongrong atau menghantjurkan Indonesia dalam bentuk sematjam itu!"

Menerima ketegasan ini berarti, bahwa kita wadjib kerdjakeras untuk membikin tumbuh subur landasan Manipol-Usdek dan Resopim, sehingga landasan itu bermahkota dalam kalbu Rakjat.

Tetapi disamping kerdja keras untuk melaksanakan indoktrinasi, kita pun wadjib kerdja keras untuk mempersatukan segala funds and forces. Untuk keperluan ini ditegaskan kita perlu meninggalkan demokrasi parlementer, jang mengandung prinsip adu-domba antara golongan dengan golongan, antara individu dengan individu. Lebih² dalam abad sekarang ini, dimana imperialisme sedang mereteli, prinsip adu-domba dari liberale parlementaire demokratie itu dieksploitir oleh subversi asing guna kepentingan sendiri.

Kita pun wadjib meninggalkan ekonomi liberal dan tegas menudju ke ekonomi sosialis, jang bersih dari exploitation de l'homme par l'homme jang menjanggupkan pada Rakjat djelata si Dadap, si Waru, si Suta, si Naja satu kehidupan jang adil dan makmur, satu kehidupan jang tata-tentrem karta-rahardja!

Dalam menghadapi pelaksanaan perdjandjian Indonesia-Belanda amanat „Tahun Kemenangan" mempertegas: „..... kami dari fihak Indonesia terpaksa tetap waspada, tetap dalam posisi perdjuangan, dalam „stelling", tetap dalam Trikora, tetap sampai ada kenjataan² jang njata, bahwa ini kali persetudjuan Indonesia-Belanda itu benar² dilaksanakan setjara djudjur dan tidak a la Renville dan Linggardjati".

Didjelakan dalam amanat „Tahun Kemenangan", bahwa hampir² ¾ dari kegiatan Nasional kita pergunakan untuk menjelesaikan keamanan dan mendjalankan Trikora. Inilah sebabnja kita sekarang menghadapi kesulitan² ekonomi. Sekarang soal keamanan dan Irian-Barat itu boleh dikatakan selesai, maka bottlenecks dan kesulitan² dari persoalan ekonomi harus sanggup diatasi dalam waktu pendek dan tidak terlalu pandjang.

Ditegaskan, bahwa untuk lantjarnja program ekonomi perlulah kita benar² menjingkirkan beberapa penjakit. „Diantara penjakit² itu, jang terpokok ialah terlalu parahnja penjakit komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, jang masih ngendon didalam hati dan kepala setengah alat² negara jang bersangkutan".

Disamping usaha membasmi komunisto-phobi, Rakjat-phobi untuk dapat memperlantjar pembentukan Dewan² Perusahaan, melaksanakan Bagi-Hasil, Landreform serta mengikut-sertakan Rakjat, terutama wakil² buruh dan tani dalam usaha² mempertinggi produksi dan memperlantjar distribusi, dalam amanat „Tahun Kemenangan" dipertegas, bahwa „Kita harus merdeka agar kita bisa leluasa bertjantjut-tali-wondo menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Kita harus merdeka, agar supaja kita bisa leluasa mendirikan satu masjarakat baru jang tiada kapitalisme dan imperialisme". Djadi Rakjat harus bisa „kiprah" sehebat-

hebatnja untuk dapat menghandjut stelsel kapitalisme/ imperialisme serta kakitangan²nja didalam negeri dan menghandjut kaum kapitalis-birokrat jang menimbulkan mismanagement pada perusahaan² negara/korupsi.

Ketegasan lain jang perlu diperhatikan adalah perlu terus memperhebat mobilisasi, mempersatukan dan mengikut-sertakan kekuatan² Rakjat jang revolusioner dengan menjempurnakan Front Nasional sehingga Front Nasional dapat bekerdja lebih effektif lagi.

Kita tetap perlu waspada dan mendjaga supaja revolusi kita tidak dirongrong dari dalam, supaja revolusi kita tetap murni dan segar!

Pun dipertegas djuga, bahwa tudjuan revolusi Indonesia adalah „congruent with social conscience of man" atau „kongruen dengan budi-nurani kemanusiaan". Oleh karenanja revolusi Indonesia mempunjai Universal Voice, mempunjai Suara Sedjagad! Karena itulah maka Indonesialah dipersilahkan oleh negara² Asia-Afrika untuk mengambil initiatief mengadakan konperensi Asia-Afrika jang kedua.

Dalam menghadapi ketegasan² itu dalam amanat „Tahun Kemenangan", kita perlu memperhatikan djuga kemadjuan² njata jang kita hadapi, jaitu a.l.:

1. Pelaksanaan perdjandjian Indonesia-Belanda sudah memasuki taraf penjelenggaraan kekuasaan administrasi atas Irian-Barat oleh Untea dan seorang tokoh Iran telah diangkat sebagai penguasa PBB di Irian-Barat.

2. Utusan² dari Rakjat Irian-Barat jang menindjau keadaan Ibu-kota dan wilajah jang telah merdeka, menimbulkan reaksi² spontaan, jang menguntungkan usaha mentjegah/ mengachiri gerakan separatisme dan mempertjepat pelaksanaan pulihnja kekuasaan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan atas wilajah Irian-Barat.

3. Pemulihan keamanan ternjata memperluas tanah, jang dapat dikerdjakan untuk mempertinggi produksi dan memperlantjar lalu-lintas barang.

4. Pemberantasan buta-huruf telah menghasilkan banjak daerah bebas buta-huruf, sehingga djumlah buta-huruf, jang

djdjaman Belanda mentjatat 92%, sekarang hanja tinggal 10% sadja.

5. Presiden telah menentukan, bahwa keadaan SOB (Darurat Perang) sudah berachir sebelum bulan Mei 1963. Karena waktu peralihan menurut UU Keadaan Bahaja adalah 6 bulan, maka putusan mengachiri keadaan SOB setjara berangsur atau sekaligus tentunja sudah ditentukan sebelum berachirnja bulan Nopember 1962 ini.

Dengan memperhatikan semua ini, maka lalu timbullah pertanjaan : Apakah tugas Baperki ?

Berdasarkan ketegasan² didalam amanat „Tahun Kemenangan", seperti antara lain jang dikutib diatas itu, maka pada umumnja dapat dinjatakan, bahwa tugas Baperki adalah :

1. Membantu dan berusaha untuk memperhebat persatuan nasional jang berporoskan Nasakom.

Untuk mentjapai ini terasa perlu diusahakan setjara lebih sungguh² : pengertian jang djelas dan merata tentang :

a. Revolusi Indonesia ;
b. Pantja Sila dan Progressivisme ;
c. Kepribadian Indonesia jang berpusat kepada gotong-rojong, musjawarah dan mufakat ;
d. Persatuan Nasional Revolusioner ;
e. Perlunja memberantas komunisto-phobi ;
f. Mutlak perlunja Nasakom ;
g. Djahatnja liberalisme
h. Satu Pimpinan Nasional ;
i. Sosialisme.

Djadi mengintensifikasi indoktrinasi Manipol-Usdek dan Resopim. Untuk keperluan ini Pengurus Pusat Harian telah mengadakan hubungan dengan Prof. Dr. H. Ruslan Abdulgani sebagai Ketua Pembina Djiwa Revolusi Nasional, sekarang Wampa Bidang Chusus tentang kemungkinan melaksanakan indoktrinasi dikalangan kader Baperki, supaja mereka dapat membantu pelaksanaan indoktrinasi setjara lebih intensif.

2. Berusaha setjara lebih sistematis untuk membantu berkembangnja Front Nasional Pusat dan Daerah, hingga dapat bekerdja lebih effektif sebagai alat-pemersatu, alat-konsentrasi seluruh kekuatan nasional revolusioner dan merupakan djuga alat membantu melaksanakan „social control" dan „social support" jang sungguh² effektif, jang membikin lebih effisien pelaksanaan pembangunan² menudju kemasjarakat sosialis.

3. Menjempurnakan pelaksanaan hak² demokrasi Rakjat dalam rangka menjempurnakan pelaksanaan demokrasi terpimpin jang effisien dalam wudjud „social control" effektif sebagai pelaksanaan ke-„kiprah"-annja Rakjat se-hebat²nja untuk dapat menghandjut habis-habisan kaum imperialis dan kakitangan²nja didalam negeri, untuk dapat menghandjut habis-habisan kaum kapitalis-birokrat jang menimbulkan mismanagement dan korupsi.

4. Mempertinggi kewaspadaan nasional revolusioner, jang menguntungkan usaha mendjaga supaja Revolusi kita murni dan segar, tidak dirongrong dari dalam.

Pelaksanaan usaha² diatas tadi itu tentu akan dipengaruhi baik dan berkembang lebih tjepat lagi dengan pentjabutan keadaan darurat perang (SOB), jang sudah diputuskan oleh Presiden akan berlaku effektif sebelum bulan Mei 1963.

5. Menjempurnakan program perdjuangan Baperki, sehingga pelaksanaan program perdjuangan itu disesuaikan dengan semangat perdjuangan melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan".

Penjelesaian masalah kewarga-negaraan berdasarkan Manipol.

Seperti diketahui, Kongres Baperki telah merumuskan tiga program perdjuangan Baperki, jaitu :

a. Menjelesaikan masalah kewarga-negaraan umumnja dan pelaksanaan perdjandjian RI-RRT setjara menguntungkan usaha memperbesar potensi nasional ;
b. Memperdjuangkan perkembangan ekonomi nasional, jang

mendjamin kesempatan madju sama dalam usaha mempertinggi daja produksi nasional dengan memperhatikan terutama usaha² koperasi produksi;

c. Memperluas kegiatan² dibidang pendidikan dari tingkat sekolah Rakjat sampai tingkat perguruan tinggi, jang bertudjuan memperbesar dan memperluas technical skill dan managerial know how jang dapat dikerahkan buat memperlantjar pembangunan² menudju kemasjarakat sosialis.

Dalam meneliti kembali program perdjuangan ini untuk disempurnakan, terutama disesuaikan dengan perdjuangan melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan", dapat dikemukakan pertimbangan² sebagai berikut:

Mengenai program pertama tentang penjelesaian masalah² kewarga-negaraan umumnja dan pelaksanaan perdjandjian persetudjuan penjelesaian dwi-kewarga-negaraan antara RI-RRT pokok pendirian jang telah ditetapkan oleh Baperki masih tetap tepat.

Pendirian Baperki jalah, supaja penjelesaian masalah² kewarga-negaraan itu ditjapai setjara sedemikian rupa, sehingga selalu memperbesar potensi nasional kita, baik dalam djumlah, maupun dalam skill dan modal. Pendirian ini membawa akibat, bahwa perlu ada kegiatan² jang ditudjukan untuk membantu orang² keturunan asing memperoleh kewarga-negaraan Indonesia dan dalam mendjadi warga-negara Indonesia ia mendjadi warga-negara jang baik, jang berguna, jang berdjiwa Manipol dan mengembangkan rasa tjinta Tanah Air jang sanggup menjelesaikan revolusi kita menudju kemasjarakat adil dan makmur.

Baperki berpendirian berdasarkan hasil penjelidikan ilmiah dari para sardjana jang ditugaskan oleh PBB, jang dirumuskan dalam laporan dengan djudul „Statement on Race", bahwa tiap orang warga-negara, tanpa memandang asal keturunannja, pasti dapat mentjapai tingkat perkembangan tjinta Tanah Air dan mengabdi pada Rakjat jang sama, dengan adanja suasana penghidupan jang sama dan kesempatan

jang sama untuk madju dan mengembangkan rasa tjinta Tanah Airnja dan kemauan mengabdikan diri pada Rakjat.

Berdasarkan kenjataan, bahwa Baperki merumuskan pendiriannja berdasarkan garis Presiden tentang penjelesaian golongan ketjil seperti dirumuskan dalam amanat Presiden pada Kongres Baperki, maka Baperki dalam memperdjuangkan penjelesaian masalah² kewarga-negaraan tetap meletakkan titik-berat pada usaha mobilisasi seluruh technical skill, managerial know how dan modal jang tersedia didalam negeri sampai pada tingkat paling maximum untuk memperlantjar proses pembangunan „nation", jang berwudjud masjarakat adil dan makmur, dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari segala matjam prasangka keturunan, bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan. Masjarakat ini bersih dari sifat² „under-developed" dan mentjapai „full employment". Dalam rumusan Manipol masjarakat itu adalah masjarakat sosialis, jang mengachiri sistim exploitation de l'homme par l'homme!

Mengenai penjelesaian dwi-kewarga-negaraan RI-RRT berdasarkan perdjandjian Indonesia-RRT, Baperki tetap berpendirian, bahwa perdjandjian itu hendaknja dilaksanakan dengan dua tudjuan:

1. Menguntungkan usaha memperbesar potensi nasional kita.
2. Menguntungkan pelaksanaan kerangka ke-3 dari revolusi kita menurut Manipol, jaitu „Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain dan atas dasar bekerdja-sama membentuk satu Dunia Baru, jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna".

Didalam pelaksanaannja Baperki selalu memperdjuangkan pelaksanaan prinsip „tjaranja memilih harus sederhana", karena dengan tjara memilih jang sederhana akan melenjapkan kesulitan² warisan djaman pendjadjahan, terutama kurang sempurnanja administrasi penduduk didjaman kolonial.

Berdasarkan pendirian itu Baperki telah berhasil mentjapai tertjantumnja pasal V dalam Peraturan Peralihan UU No. 62/1958 tentang kewarga-negaraan Indonesia, jang praktis memberi kesempatan pada mereka, jang pada waktu antara tanggal 27 Desember 1949 dan 27 Desember 1951, masih belum dewasa untuk memilih kembali kewarga-negaraan Indonesia, apabila ia mendjadi asing akibat tindakan orang-tuanja.

Dan berdasarkan pendirian itu djuga Baperki menjambut dengan gembira diperluasnja golongan jang berdwi-kewarganegaraan dengan mereka jang pada waktu 27-12-1949 dan 27-12-1951 masih belum dewasa, sekalipun perluasan ini kemudian dipersempit kembali dengan adanja tambahan ketentuan dalam PP No. 5-1961 pasal I, jaitu sebagai berikut: „ ..... dengan pengertian, bahwa jang diperbolehkan menjatakan keterangan tsb hanja mereka jang belum pernah meninggalkan wilajah Republik Indonesia tanpa idjin-kembali (re-entry permit) atau belum pernah meninggalkan wilajah Indonesia selama waktu jang melebihi djangka waktu idjin-kembalinja, semendjak penolakan dari atau oleh orang-tuanja".

Dalam memperhatikan laporan^2 dari Tjabang^2 Baperki, jang ikut aktif membantu orang^2 jang bersangkutan untuk memperlantjar penjelesaian dwi-kewarga-negaraan, dapat ditarik berbagai kesimpulan sebagai berikut:

1. „Tjaranja memilih sederhana", diberbagai daerah seringkali tidak sederhana karena prosedur memperoleh surat keterangan lahir seringkali makan banjak waktu, disamping banjak ongkos, jang atjapkali diluar kemampuan untuk membajar dari orang^2 jang bersangkutan.

Orang^2 jang termasuk golongan „mampu" praktis sudah selesai surat^{2}nja jang berhubungan dengan pelaksanaan penjelesaian dwi-kewarga-negaraan.

Jang masih belum selesai surat^{2}nja djusteru adalah mereka jang termasuk golongan ekonomis lemah.

Dalam menghadapi kenjataan ini, maka Baperki berusaha untuk mohon kebidjaksanaan pemerintah untuk melaksanakan prinsip „tjara memilih sederhana" bagi orang^2 jang te-

rang tergolong „kurang mampu" itu sedemikian rupa, sehingga surat keterangan lahir jang diberikan oleh lurah, jang disahkan oleh tjamat dapat berlaku sebagai keterangan dilahirkan di Indonesia, jang diperlukan oleh hakim untuk menentukan, apakah jang bersangkutan betul berwarga-negara rangkap ataukah tidak.

Pembagian formulir C dan D dapat dikatakan tjukup memuaskan dengan adanja bantuan dan pengertian dari fihak Pamong Prodjo, terutama dari fihak Departemen Dalam Negeri dan Panitia Pemilihan Indonesia.

3. Pelaksanaan Peraturan Peralihan pasal V dari UU No. 62/1958 ternjata seringkali dihubungkan dengan Pelaksanaan Penjelesaian Dwi-kewarga-ngaraan dari Peraturan Pemerintah No. 20/1959 pasal 1 ajat 1 (baru, sebagai akibat tambahan PP No. 5/1961) dan masih belum lantjar seperti jang diharapkan.

Ketidak-lantjaran ini disebabkan oleh pelaksanaan „tambahan" rumusan jang mempersempit djumlah orang^2 jang bersangkutan, jaitu „tambahan" jang berbunji: „Dengan pengertian etc. etc." seperti dikutib diatas tadi.

Apabila kita perhatikan laporan Susanto Tirtoprodjo S.H., Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Panitia Bersama RI-RRT, jaitu didalam bukunja jang berdjudul „Hasil Kerdja Panitia Bersama", maka ketidak-lantjaran itu kemungkinan besar sekali karena masih ada sematjam „komunisto-phobi" dikalangan alat-negara jang wadjib melaksanakannja, disamping kekurangan tenaga pada alat-negara untuk melaksanakan penelitian sebagai akibat „tambahan" rumusan jang mempersempit itu.

Pendapat ini berdasarkan pendjelasan dari Susanto Tirtoprodjo S.H. dalam bukunja, jang menuturkan sedjarah „tambahan" itu sebagai berikut:

„Baru pada tanggal 22 November 1960 Ketua Delegasi RI dalam Panitia Bersama diberi kesempatan memberi pendjelasan tentang Rentjana Tjara-Pelaksanaan jang telah selesai tersusun itu dalam sidang kabinet.

„Maka ternjatalah, bahwa dalam kabinet terdapat opposisi, terutama terhadap pasal 1 ajat 2 Rentjana Tjara-Pelaksa-

naan, jang memberikan kesempatan kepada anak² belum dewasa diantara tanggal 27 Desember 1949 dan 27 Desember 1951, karena mengikuti orang-tuanja atau oleh orang-tuanja ditolakkan kewarga-negaraan RI-nja, telah mendjadi warga-negara tunggal RRT untuk melakukan pemilihan antara kewarga-negaraan RI dan kewarga-negaraan RRT, sehingga memperoleh kewarga-negaraan tunggal RI.

„Adapun alasannja ialah karena dichawatirkan, bahwa beribu-ribu pemuda Tionghoa jang sudah pulang kembali ke Tiongkok dan disana telah „di-indoktrinasi" dengan ideologi komunisme, akan kembali lagi ke Indonesia sebagai warga-negara RI." (katja 17).

Dalam katja 18, Susanto Tirtoprodjo S.H. mendjelaskan lebih djauh sebagai berikut:

„Sedang Panitia ad hoc itu sibuk membahas dan menjusun usul² perobahan, maka pada tanggal 29 Nopember 1960, Presiden memanggil Dutabesar RI di Peking, Soekarni, bekas Dutabesar RI di Peking, Mononutu dan Ketua Delegasi RI dalam Panitia Bersama, dalam pertemuan mana Presiden memberikan dorongan supaja Rentjana Tjara-Pelaksanaan segera ditandatangani dengan alasan politis segera menjelesaikan persoalan dwi-kewarga-negaraan dengan RRT untuk memelihara semangat persahabatan dengan negara jang benar² sahabat kita itu. Berpesanlah Presiden supaja kita berdjiwa besar, berfikir setjara luas dan djanganlah memandang persoalan ini sampai details jang ketjil², antara lain dengan kata: „Seandainja betul beribu-ribu pemuda RRT jang sudah di-indoktrinasi dengan ideologi komunisme akan kembali lagi masuk Indonesia sebagai warga-negara RI, kita tidak usah takut², karena sekarangpun sudah ada 8 djuta warga-negara RI jang berhaluan komunis".

„Untuk melaksanakan dorongan Presiden itu, maka Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio memberikan instruksi kepada saja untuk setjara informil membitjarakan dengan Dutabesar Huang Chen usul² perobahan jang diadjukan oleh Panitia ad hoc.

„Pembitjaraan informil itu terdjadi pada tanggal 3 Desember 1960. Adapun hasil dari pembitjaraan itu ialah:

„1. Mengenai pasal 1 ajat 2 Rentjana Tjara-Pelaksanaan, usul jang diadjukan supaja anak² diantara 27 Desember 1949 dan 27 Desember 1951 belum dewasa diperbolehkan memilih lagi mendjadi warga-negara RI itu **dibatasi** hanja mereka jang **selalu tetap bertempat tinggal diwilajah Republik Indonesia**, oleh Dutabesar Huang Chen dinjatakan tidak perlu, karena dalam pandangan RRT memang itulah jang dimaksudkan. Ditambahkannja pula, bahwa mereka jang mendjadi warga-negara RRT tunggal dan telah pulang ke Tiongkok tidak akan kembali ke Indonesia. Meskipun demikian, RRT berkeberatan untuk memuat pembatasan jang diusulkan oleh Panitia ad hoc itu dalam Rentjana Tjara-Pelaksanaan, karena jang sedemikian itu mengandung unsur ketidak-kepertjajaan terhadap RRT".

Demikianlah pendjelasan Susanto Tirtoprodjo S.H., jang sebagian sudah pernah dikutib dalam laporan konperensi jl, tetapi untuk mengerti ketidak-lantjaran jang dihadapi sekarang ini terasa baik sekali, apabila kita memahami sedjarah „tambahan" jang bersifat membatasi itu. Memang, menjedihkan ! Walaupun sudah **dibatasi**, tetapi pelaksanaannja belum djuga lantjar dan ribuan pemuda harus menantikan penjelesaian surat²nja jang belum dapat diselesaikan oleh alat-negara kita.

Dengan mengetahui dan mengerti sedjarah terdjadinja „tambahan" tsb, maka kita tentu lebih merasakan penting artinja ketegasan Presiden Soekarno dalam amanat „Tahun Kemenangan" tentang „bottle-necks" jang diakibatkan oleh „terlalu parahnja penjakit komunisto-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, jang masih ngendon dalam hati dan kepala setengah alat² negara jang bersangkutan". Usaha membantras komunisto-phobi dan usaha memperhebat gotong-rojong seluruh kekuatan revolusioner dengan poros Nasakom terasa penting sekali dan berhasilnja usaha ini dapat diharapkan akan memperlantjar pelaksanaan penjelesaian dwi-kewarga-negaraan setjara menguntungkan usaha pengerahan funds and forces progressif sampai pada tingkat paling maximum dan setjara menguntungkan usaha pelaksanaan kerangka ketiga revolusi kita.

Usaha² Tjabang Baperki untuk membantu kelantjaran penjelesaian dwi-kewarga-negaraan RI-RRT itu ternjata perlu dilandjutkan dengan bekerdja setjara lebih teliti karena telah memperoleh banjak pengalaman kerdja. Dalam hubungan ini tentu perlu sekali diperhatikan, bahwa tiap tahun ada pemuda, jang meningkat usia 18 tahun dan perlu dibantu menjelesaian surat² kewarga-negaraan Indonesia tunggalnja.

Disamping itu tentu sadja perlu diperhatikan ketentuan pasal 10 Persetudjuan tentang Tjara-Pelaksanaan, jang dirumuskan dalam Pasal III P.P. No. 5/1961, jang mengakibatkan adanja Pasal 4A baru dalam P.P. No. 20/1958. Bunjinja adalah sebagai berikut :

„Seorang jang pernjataan keterangannja ditolak dengan **pasti** dapat dalam djangka waktu satu bulan setelah ditolaknja pernjataan keterangan itu, mengadjukan permohonan kepada Panitia Bersama Perdjandjian Dwi-kewarga-negaraan antara RI dan RRT, supaja soalnja diperiksa dan djika oleh Panitia Bersama tsb dipandang beralasan, maka soalnja dapat diadjukan kepada Menteri Kehakiman jang bersangkutan dengan usul penolakan tsb ditindjau dan diurus kembali".

Pasal ini diperhatikan untuk mentjegah terdjadinja penolakan keterangan jang disebabkan karena kekurangan keterangan berhubung dengan keadaan administrasi penduduk warisan pendjadjahan Belanda, jang mengandung banjak kelemahan.

Baperki wadjib ikut aktif dalam usaha menanggulangi kesulitan ekonomi.

Dalam merumuskan program pasal kedua Baperki menggunakan sebagai landasan garis Presiden Soekarno tentang penjelesaian masalah golongan ketjil, jang menugaskan pengerahan segala technical skill, managerial know how dan modal jang tersedia didalam negeri untuk membangun masjarakat adil dan makmur, jang tidak mengenal lagi sifat² „underdeveloped" dan mentjapai „full employment", sehingga tiap warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari segala matjam pra-

sangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan. Masjarakat adil dan makmur itu sekarang dipertegas adalah masjarakat sosialis, jang mengachiri sistim exploitation de l'homme par l'homme.

Proses peralihan masjarakat jang sekarang ini menudju kemasjarakat sosialis itu memerlukan waktu dan akan dilakukan tahap demi tahap dengan pelaksanaan Rentjana² Pembangunan Nasional Semesta.

Tetapi dalam melaksanakan proses ini, kita pun menghadapi kelemahan² umum dan persoalan² umum, jang dirasakan oleh negeri² jang muda dan jang pernah mengalami kekuasaan pendjadjahan jang lama, seperti halnja Indonesia kita ini. Kelemahan² dan persoalan² itu antara lain adalah :

1. Kekurangan tenaga jang terlatih baik untuk mengembangkan politik ekonomi jang bebas, melaksanakan berbagai matjam rentjana pembangunan, menjusun dan melaksanakan rentjana² industrialisatie, memperluas hubungan dagang dengan negeri² lain setjara bebas, mengurus dan mengatur peredaran mata uang sendiri, jang perlu dipertahankan baik nilai tukarnja. Tenaga² jang diperoleh dari warisan pendjadjahan memang baik untuk keperluan mendjalankan roda pemerintahan pendjadjahan, jang mesti mentjiptakan suasana baik untuk keperluan perdagangan dan investment kolonial. Tetapi untuk keperluan melaksanakan aspiratie nasional, jang menjebabkan ditjetuskannja proklamasi kemerdekaan, terasa tenaga² warisan pendjadjahan itu mengandung kelemahan² pokok.

2. Sifat produksi industri setelah perang dunia kedua mengalami perobahan jang sangat besar sekali. Revolusi industri jang dihadapi oleh ummat manusia sekarang ini wataknja memang berlainan daripada revolusi² industri duluan diabad ke-18 dan abad ke-19. Terutama beda dalam ketergantungannja pada hasil² penjelidikan jang mesti dilakukan setjara tekun terus-menerus, beda dalam kebutuhan akan tenaga manusia dan kebutuhan akan modal dan djuga pengaruhnja pada masjarakat. Sifat produksi industri itu mempunjai watak jang berlainan. Orang jang hidup pada permulaan abad ke-20 ini tidak berani mengimpikan, bahwa

setelah pertengahan abad ke-20 ini dapat terdjadi perubahan² besar dalam sifat produksi industri seperti jang disaksikan sekarang ini. Untuk memungkinkan revolusi industri bergerak terus bukan sadja ilmu pengetahuan dan technology harus diselami setjara mendalam dan diperluas, melainkan djuga djumlah manusia jang harus di-ikut-sertakan meliputi djumlah percentage jang terus meningkat. Sebagai semua negara A-A pada umumnja Indonesia masih terbelakang dalam hal menguasai ilmu pengetahuan dan technology. Djadi harus berusaha untuk menjusul keterbelakangan ini dalam waktu sesingkat mungkin.

3. Dalam usaha mengembangkan industri dan mengintensifkan usaha menggali kekajaan alamnja untuk mentjapai ekonomi jang bebas dan seimbang (independent and balanced economy) ternjata sangat tergantung pada inisiatif negara, karena modal nasional swasta pada umumnja di-negeri² Asia-Afrika belum tumbuh tjukup kuat untuk melaksanakannja sendiri. Pada umumnja memang terasa dialami kekurangan modal dan technical skill.

Dalam hubungan dengan ini „bantuan" ekonomi dari negeri² asing merupakan satu masalah jang ruwet. Terutama setelah Rakjat A-A pada umumnja memperhatikan pengalaman Kuomintang di Tiongkok. Bantuan raksasa Amerika Serikat pada Kuomintang di Tiongkok antara tahun 1945-1948 hanja membawa akibat memperkaja sedjumlah ketjil pembesar korup dan mentjiptakan klas kontraktor dan perantara jang memperluas djurang pemisah antara Rakjat dan pemerintahan dengan akibat Rakjat menggulung pemerintahan jang korup. Pengalaman selama kekuasaan Kuomintang di Tiongkok dan pengalaman dari negeri² A-A-A setelah perang dunia II menimbulkan kejakinan jang merata di Rakjat² A-A-A, bahwa bantuan uang asing tanpa ada pemerintahan Rakjat jang sesungguhnja serta tanpa ada rentjana pembangunan jang terperintji djelas ternjata selalu merupakan sumber korupsi besar-besaran bagi orang² jang mengurusnja dan ternjata tidak membantu berkembangnja industrialisatie jang djusteru sangat diperlukan.

4. Disamping itu setelah perang dunia II, jang menjebab-

kan banjak negeri imperialis kehilangan tanah djadjahannja, ternjata tampak tambah tegas lagi usaha negeri² imperialis untuk melaksanakan neo-kolonialisme dalam bentuk :

a. Menekan rendah harga bahan² mentah jang harus di-export oleh negeri² jang baru merdeka dan sedang berkembang.

b. Menarik naik harga barang² mesin dan hasil industri jang harus di-import oleh negeri² jang baru merdeka dan sedang berkembang.

Akibat dari politik ini jalah negeri² jang sedang berkembang selalu kekurangan uang asing, kekurangan deviezen untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspiraties nasionalnja. Malahan untuk mempertahankan tingkat hidup seperti djaman pendjadjahan sadja sulit tanpa „bantuan" dari negeri² asing.

Walaupun politik itu achir²nja djuga mempersulit perkembangan industri negeri jang telah madju industrinja, karena politik itu berakibat mempersempit pasar bagi hasil² industrinja dan kesulitan itu tjoba diatasi dengan memberi „bantuan²" kredit, tetapi segala „bantuan²" itu djuga tetap mengandung unsur pelaksanaan politik neo-kolonialisme, karena menuntut adanja aturan² dari negeri² jang sedang berkembang untuk mengadakan djaminan² jang menarik penanaman modal asing, djaminan hak transfer, djaminan tidak dinasionalisasi dll-nja lagi.

Menurut statistik Bank Dunia selama tahun 1956-1961 hutang negara² jang sedang berkembang pada Bank Dunia telah meningkat dua kali lipat. Walaupun demikian hasil exportnja hanja bertambah 15%. Keadaan ini antara lain oleh Marcus Wallenberg, seorang Bankier Swedia, didjadikan alasan untuk mendesakkan pada negeri² jang sedang berkembang untuk membuka pintunja lebar² buat penanaman modal asing dengan djaminan² lajak, jaitu seperti diberitakan oleh „Antara" baru² ini.

Indonesia tentu sadja tidak bebas dari pengaruh perkembangan politik ekonomi internasional, jang dikuasai oleh negeri² imperialis itu, apalagi hubungan dagang tradisionil warisan djaman pendjadjahan masih membikin Indonesia

tergantung pada perkembangan harga apa jang dikenal sebagai „pasar internasional" dengan pusat² London, New York, Amsterdam dan Hamburg. Perdjuangan mentjapai harga jang lajak bagi bahan² mentah jang di-export belum berhasil. Malahan harga „pasar internasional" bagi banjak matjam bahan mentah jang di-export oleh Indonesia djatuh, karena Amerika Serikat dan Inggeris sering melepaskan timbunan² bahan² strategisnja dengan akibat sangat mempersulit neratja perdagangan Indonesia dan kekurangan akan uang asing untuk dapat memenuhi kebutuhan² jang masih mesti di-import selalu menekan pelaksanaan aspiraties nasional untuk mempertjepat pembangunan.

5. Peralihan penghidupan ekonomi dari negeri² A-A sesuai dengan aspiratie nasionalnja memang tidak hanja merupakan masalah pembangunan industri, tidak terbatas pada masalah industrialisatie. Hal ini disebabkan, karena Rakjat terbanjak hidup di-desa² jang besar djumlahnja dalam keadaan jang sangat primitif sekali. Pun usaha² dibidang pertanian masih sangat primitif. Oleh karenanja pelaksanaan pembangunan di-negeri² A-A harus ditudjukan untuk mentjapai keseimbangan antara kemadjuan² industri di-kota² dan perkembangan masjarakat desa. Apabila tidak ada keseimbangan akan timbul kesulitan² baru, karena menghebatnja perbedaan antara penghidupan di-kota² besar dan di-desa² ketjil, jang dapat merugikan usaha memenuhi kebutuhan barang² hasil pertanian.

Setjara ringkas dapat dikemukakan, bahwa masalah² pokok jang dihadapi dibidang ekonomi adalah antara lain :

a. Membangun ekonomi desa dengan modernisatie pertanian, sehingga daja-produksi kaum tani, jang merupakan djumlah Rakjat terbesar, dapat dibebaskan dari segala matjam belenggu jang masih terasa mengekangnja, dimulai dengan landreform dan ketentuan mengerdjakan tanah setjara lebih menguntungkan kaum penggarap tanah. Dengan membebaskan daja-produksi kaum tani, jang merupakan djumlah Rakjat terbesar, kita akan dapat mempertinggi daja-beli Rakjat terbanjak itu untuk mendorongkan kemadjuan² perkembangan industri setjara lebih tjepat lagi.

b. Mengusahakan tertjapainja „balanced economy" sebagai gantinja ekonomi kolonial, sesuai dengan kondisi² dinegeri kita sendiri dengan tudjuan mempertjepat hapusnja sifat tergantung dari „bantuan²" atau dari „import" modal asing atau „kredit²" luar negeri, jang dapat mendjerumuskan kita ke ekonomi neo-kolonial. Dalam „balanced economy" ini kemadjuan ekonomi desa dan ekonomi kota diusahakan ada keseimbangan.

c. Mengembangkan industri dan mengexploitasi setjara lebih intensif sumber² kekajaan alam, jang dapat mengurangi import dan mempertinggi penghasilan deviezen untuk mempertinggi kemampuan kita melaksanakan aspiratie nasional dibidang pembangunan menudju kearah tertjapainja „self-sustaining economy" sebagai landasan untuk membangun masjarakat adil dan makmur, jang bersih dari exploitation de l'homme par l'homme.

Demikianlah setjara ringkas persoalan², jang menjimpulkan djuga kelemahan², jang kita harus hadapi dalam melaksanakan peralihan ekonomi kolonial kita ke ekonomi nasional jang bebas, jang harus berkembang mewudjudkan masjarakat sosialis.

Pelaksanaan peralihan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional jang bebas di Indonesia pun dipengaruhi oleh djaman penjelewengan politik, jang mendorong didekritkannja kembali UUD 1945.

Kita lihat bahwa didjaman penjelewengan telah terdjadi hal² antara lain sebagai berikut :

1. Kita tidak mendahulukan usaha membebaskan kaum tani kita, Rakjat terbanjak, daripada belenggu²nja, jang terasa mengekang daja-produksinja, tetapi kita menjaksikan perlombaan dikalangan lapisan atas jang sangat tipis untuk memupuk modal nasional. Akibatnja djumlah importir meningkat keras, karena perdagangan import jang „empuk" dan membikin orang tjepat kaja. Kebutuhan deviezen untuk import terus meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan deviezen ini dilaksanakan export-drive. Untuk keperluan ini, karena harga diluar negeri tetap lemah dan diperlemah, ongkos produksi didalam negeri ditekan rendah jang tidak me-

mungkinkan berkembang daja-produksi Rakjat terbanjak kita. Kita pernah melihat akibatnja jang tidak enak, jaitu disamping kita harus mempertinggi import beras, walaupun tanah kita terkenal subur, kita pun pernah mesti import garam, walaupun laut kita luas dan air laut kita sama asinnja daripada air laut lain.

2. Kita tidak melaksanakan pengerahan funds & forces jang tersedia didalam negeri sampai tingkat maximal, malahan membatasi kemungkinan pengerahan funds & forces dengan mempraktekkan diskriminasi rasial dengan politik jang dikenal sebagai main asli-aslian, jang dinjatakan salah oleh amanat Presiden Soekarno pada Kongres Baperki. Djadi modal domestik dan milik warga-negara jang dinjatakan „bukan asli" dibiarkan menganggur, hingga mendjadi „liar", dalam arti dipaksa bergerak dilapangan perdagangan spekulasi.

3. Kita pernah berusaha melambai-lambai masuk modal asing dengan mengemukakan djaminan², jang pelaksanaannja mendjerumuskan kita ke neo-kolonialisme dan berusaha memperoleh kredit², jang mentjiptakan lapisan tipis orang², jang mewah hidupnja tergantung pada berkembangnja kepentingan negeri² peng-export modal asing itu.

4. Perkembangan neratja perdagangan karena akibat harga bahan² mentah jang kita export terus menurun adalah buruk. Meningkatnja volume export tidak mendjamin penghasilan diviezen lebih besar. Sedang harga barang² jang diimport terus meningkat, sehingga volume import menipis, walaupun deviezen jang disediakan meningkat. Akibatnja kita pernah mengalami tindakan² untuk menjehatkan keadaan keuangan, jang dinamakan „sanering", tetapi keuangan kita tidak mendjadi sehat oleh karenanja dan nilai tukar rupiah kita terus djatuh.

5. Social control sebagai sjarat pelaksanaan demokrasi dan untuk mengembangkan social support bagi tindakan² pemerintah sangat lemah, karena anggaran belandja negara tidak dapat ditentukan sebelum masa berlakunja dan praktis semua tindakan dibidang keuangan dan ekonomi diatur dengan undang² darurat atau peraturan pemerintah sadja.

Rakjat mesti menghadapi kebidjaksanaan pemerintah dibidang keuangan dan ekonomi sebagai „surprises" jang tidak enak.

Seperti diketahui kita telah berusaha mengachiri djaman penjelewengan itu dengan dekrit Presiden 5 Djuli 1959, jaitu dengan kembali ke UUD 1945 dan pada tanggal 17 Agustus 1959 diumumkannja amanat „Menemukan Kembali Revolusi Kita", jang sekarang dikenal sebagai Manipol dan mendjadi garis² besar haluan negara.

Tetapi koreksi atas segala penjelewengan² jang telah terdjadi belasan tahun itu tentu makan waktu. Manipol dengan tepat mewadjibkan pelaksanaan Landreform dan memperbaiki kedudukan tani penggarap tanah dengan peraturan Bagi-Hasil. Tetapi pelaksanaannja ternjata tidak selantjar jang diharapkan oleh Manipol.

Manipol dan semua Pedoman Pelaksanaannja mewadjibkan ikut-sertanja Rakjat, buruh dan tani untuk mengembangkan produksi dan memperlantjar distribusi, jang berarti melaksanakan „social control" untuk mentjiptakan „social support", tetapi dalam amanat Tahun Kemenangan ditegaskan, bahwa pelaksanaannja ketjantol pada masih berdjangkitnja „komnisto-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi, tani-phobi", jang masih kita mesti bantras.

Sementara koreksi² atas penjelewengan itu belum memberi hasil njata, kita mesti menjelesaikan berbagai kelemahan jang terasa njata dalam management perusahaan² negara. Usaha mendudukan perusahaan² negara pada „commanding position" jang dapat mendorong perkembangan ekonomi nasional bebas sebagai landasan pembangunan masjarakat sosialis, belum mentjapai hasil. Oleh beberapa orang menteri sendiri disinjalir adanja penjelewengan dan oleh umum disinjalir adanja mismanagement jang menimbulkan kapitalisme birokrasi dan korupsi. Mismanagement ini menimbulkan kesulitan², jang perlu segera diatasi untuk mentjegah perkembangan lebih buruk lagi.

Banjak laporan masuk tentang kegandjilan² dibidang produksi kopra. Didaerah kopra, Rakjat kurang bernapsu untuk membikin kopra, jang perdagangannja diurus oleh perusaha-

an² negara. Mendjual kelapa mentah lebih menguntungkan daripada mendjual kopra. Lain laporan lagi menuturkan ada banjak kopra tertimbun, tetapi tidak bisa diangkut lantjar

Didaerah lain diterima laporan, bahwa didaerah djeruk di Sumatera Selatan djeruk tidak ada harganja, hingga petani merasa tidak perlu memetik djeruk, sedang harga kebutuhan hidup terus meningkat. Kelantjaran pengangkutan terganggu oleh kesulitan spare-parts.

Dalam keadaan² demikian itu, kita menghadapi intensifikasi pemulihan keamanan dan Trikora, jang seperti didjelaskan oleh Presiden dalam amanat „Tahun Kemenangan" menjebabkan penggunaan hampir 75% dari kegiatan nasional kita.

Sekarang keamanan telah pulih dan pelaksanaan Trikora mentjapai tingkat penjelesaian, jang dapat mengurangi anggaran belandja dalam djumlah jang tidak ketjil, sehingga harapan baru timbul, bahwa kita akan dapat menggarap dan mengatasi kesulitan² ekonomi jang dihadapi dalam waktu jang tidak terlalu lama memang beralasan.

Baperki sebagai organisasi massa dan menjediakan diri sebagai salah satu alat-revolusi sebagai anggota Front Nasional tentu sadja wadjib menjiapkan diri untuk ikut aktif menanggulangi kesulitan² ekonomi, apalagi kesulitan² ekonomi itu wadjib kita atasi untuk melapangan proses kearah realisasi tjita² dan tudjuan Baperki sendiri, jaitu kearah terwudjudnja masjarakat sosialis.

Oleh karenanja dalam rangka melaksanakan pasal 2 dari program Baperki, jang masih terasa perlu di-intensifkan pelaksanaannja, terasa perlu Baperki ikut berusaha untuk :

1. Mentjapai pelaksanaan „social control" guna mentjapai adanja „social support" setjara maximal, antara lain dengan memperdjuangkan adanja Anggaran Belandja Negara, jang ditentukan sebelum masa berlakunja, adanja kebiasaan, bahwa segala matjam pungutan dan tindakan² jang berakibat mengubah nilai tukar mata uang kita, diatur dengan undang², djadi sebagai hasil permusjawaratan dengan di-ikut-sertakannja Rakjat, disamping melaksankan setjara sungguh² di-ikut-sertakannja Rakjat dibidang usaha mempertinggi produksi

dan memperlantjar distribusi, seperti ditugaskan oleh amanat „Tahun Kemenangan".

Mengikut-sertakan Rakjat tentu tidak bisa diartikan lain daripada Rakjat ikut-serta menentukan kebidjaksanaan pemerintah, djuga dibidang keuangan dan perekonomian, jang biasanja ditjerminkan oleh Anggaran Belandja Negara. Rakjat jang di-ikut-sertakan menentukan kebidjaksanaan pemerintah, tentu insjaf dan sadar akan perlunja mendukung, memberikan „social support", jang mendjamin berhasilnja pelaksanaan kebidjaksanaan pemerintah itu.

Kenjataan, bahwa pelaksanaan banjak UU darurat tidak selantjar sebagaimana mestinja, mestinja sudah tjukup mejakinkan kita, bahwa tanpa ikut-sertanja Rakjat dalam menentukan, sukar diharap dukungan, social support, setjara maximal.

Dalam rangka mentjapai pelaksanaan „social control" jang effektif untuk mendjamin adanja „social support" maximal, tentu sadja patut disambut dengan gembira sekali putusan Presiden Soekarno untuk mentjabut keadaan SOB (darurat perang) sebelum bulan Mei 1963. Pelaksanaan „social control" jang effektif dipertjaja akan menjempurnakan pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Disamping itu adanja „social control" jang effektif pun pasti mempengaruhi baik usaha mengachiri mismanagement pada Perusahaan² Negara, jang menjebabkan timbulnja kapitalisme birokrat dan korupsi.

2. Mentjapai penjelesaian rupa² kontradiksi jang njata ada dalam masjarakat kita untuk mendjamin berhasilnja pengerahan funds & forces sampai pada tingkat paling maximal.

Dalam rangka melaksanakan pengerahan funds & forces progressif seperti jang ditugaskan oleh Manipol, terasa bahwa kita melaksanakannja setjara sempit. Dalam arti perhatian kita ditudjukan terbatas pada usaha mengerahkan apa jang dinamakan „idle money" atau „hot-money", jaitu dengan mendjual obligasi negara, obligasi Bank Negara Indonesia dan mengadakan musjawarah nasional.

Terasa kurang disadari, bahwa pengerahan funds & forces dalam arti jang sempit itu tidak mungkin memberi hasil be-

sar dalam arti jang diharapkan oleh Manipol.

Disamping itu kita pun harus menghadapi kenjataan, bahwa selama kita belum berhasil mengendalikan inflasi, sehingga nilai tukar rupiah mendjadi stabil, pemilik „idle money" atau „hot money", jang pada umumnja bukanlah filantropen, tentu tetap mentjari lapangan usaha jang dianggap lebih tepat untuk menjelamatkan nilai tukar modalnja. Usaha² ini memang bisa mengatjaukan peredaran barang, jang dapat mempengaruhi djelek usaha mengendalikan inflasi.

Selandjutnja kita menghadapi djuga kenjataan, bahwa nilai-tukar dari hasil² pertanian Rakjat didalam negeri perlu diatur, hingga membangkitkan kegairahan berproduksi. Disamping itu perlu kita selesaikan keseimbangan harga barang² kebutuhan hidup dengan upah buruh dengan gadji pegawai negeri bagian atas dan rendah untuk mentjegah timbulnja birokrasi setjara extra dengan maksud memperoleh penghasilan tambahan, jang seringkali meluntjur ke kapitalisme birokrasi.

Paling achir kita melihat djuga, bahwa alat-negara kita belum seluruhnja bebas dari rasialisme, jang djuga menimbulkan bottlenecks dalam pelaksanaan pengerahan funds & forces, jaitu seperti ditjanangkan oleh Ketua Partindo, A.M. Hanafi. Sebagai bukti masih berdjangkitnja rasialisme pada alat-negara, dapat dikemukakan adanja surat edaran pemimpin alat-negara disatu kota di Djawa Tengah, jang menentukan pembagian bemo terbatas pada mereka jang dinamakan „asli" dan pada pengendara betja.

Dalam rangka usaha menghapuskan betja, sebagai alat exploitation de l'homme par l'homme jang memalukan, memang perlu sekali para tukang betja disalurkan kepekerdjaan lain. Apabila mereka dapat memperoleh pekerdjaan lain, dapat dipertjaja mereka tentu tidak bersedia mendjadi tukang betja. Dalam rangka usaha ini Baperki sangat setudju, apabila priorita membeli bemo diberikan pada para tukang betja Tetapi dalam pelaksanaannja hendaknja tidak diadakan perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan antara para tukang betja jang sesungguhnja. Hendaknja diperdju-

angkan adanja koreksi jang bidjaksana, sehingga kebidjaksanaan untuk melindungi mereka jang ekonomis lemah, kebidjaksanaan untuk memperbaiki nasib golongan warganegara Indonesia jang berada dilapisan terendah, bebas dari rasialisme. Nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme anti-rasialisme. Peristiwa itu pun memperbesar kejakinan, bahwa selama masjarakat masih belum bersih daripada napsu penindasan manusia oleh manusia, rasialisme belum dapat dihapuskan sama sekali. Djadi memperkokoh kejakinan kita akan perlunja mempertjepat tertjapainja masjarakat sosialis jang bersih dari penindasan manusia oleh manusia!

3. Menjempurnakan kerdja-sama dengan organisasi² massa buruh dan tani dalam rangka usaha mengembangkan gerakan koperasi type Usdek, koperasi konsumsi, koperasi produksi pertanian, koperasi keradjinan tangan dan koperasi kredit. Sengadja digunakan istilah koperasi type Usdek, karena jang kita butuhkan bukanlah koperasi asal koperasi, jang bisa merupakan „koperasi" dalam nama, tetapi sesungguhnja adalah usaha² kapitalis² besar, bukan usaha² pekerdja, jang dibutuhkan adalah koperasi jang mendjadi alat memperlantjar proses peralihan menudju kemasjarakat sosialis.

Dalam hubungan ini patut diperhatikan angka² sebagai berikut seperti jang disiarkan oleh „Antara", jaitu:

Sekarang kurang lebih di 80% desa dan kampung sudah terbentuk koperasi konsumsi dan lebih kurang antara 50-60% Rakjat dewasa sudah bernaung dibawah pandji koperasi setjara formil.

Djumlah koperasi keradjinan (terutama dibidang batik) hanja 3% dari seluruh djumlah koperasi, tetapi djumlah modalnja meliputi 43% dari seluruh modal koperasi jang ada. Dengan begitu tergambar lemahnja keadaan permodalan 97% koperasi lainnja, jang meliputi konsumsi, kredit dan produksi pertanian.

Dengan memperhatikan angka² itu sebagai kenjataan, disamping perlunja mengembangkan kegiatan dibidang koperasi produksi dan kredit dengan kerdja-sama lebih baik dengan organisasi² massa tani dan buruh di-desa² dan kota², maka terbuka kemungkinan mengusahakan penjelesaian²

kontradiksi jang kurang perlu antara kota dan desa dengan koperasi produksi pertanian dan koperasi kredit jang bekedja dengan baik dalam rangka usaha melaksanakan pengerahan funds & forces sampai pada tingkat paling maximal.

Usaha² Baperki dibidang perguruan tinggi dan pendidikan harus dikonsolidasi.

Pelaksanaan pasal ketiga dari program Baperki, jaitu mengkonsolidasi usaha² dibidang perguruan tinggi dan pendidikan dengan meletakkan titik-berat pada pendidikan kedjuruan, jang dapat menguntungkan proses peralihan menudju kemasjarakat sosialis, ternjata perlu sekali dilaksanakan setjara lebih sempurna, lebih intensif.

Dari laporan tentang perkembangan perguruan tinggi kita dan laporan tentang perkembangan usaha² Baperki dibidang pendidikan dasar tergambarlah, bahwa perkembangan usaha² Baperki dibidang perguruan tinggi dan dibidang pendidikan dasar telah tumbuh djauh lebih pesat daripada kita berani harapkan semula. Oleh karenanja usaha² mengkonsolidasi perlu dilaksanakan setjara lebih intensif lagi daripada jang sudah².

Kesimpulan ini pun mendjadi sebab kita perlu dalam waktu singkat memperluas untuk menjempurnakan pengurus Jajasan Pendidikan & Kebudajaan Pusat Baperki. Dalam susunan pengurus jang diperluas itu dipikirkan untuk memperkuat pengurus Jajasan dengan :

a. Seorang petugas chusus jang memperhatikan, mengurus dan menjelenggarakan usaha² pelaksanaan konsolidasi usaha² kita dibidang perguruan tinggi.

b. Seorang petugas chusus jang memperhatikan, mengurus dan menjelenggarakan usaha² pelaksanaan konsolidasi usaha² dibidang pendidikan dasar.

c. Seorang petugas chusus untuk mengembangkan pendidikan kedjuruan dan kursus² kedjuruan.

d. Seorang petugas chusus jang memperhatikan, mengurus dan menjelenggarakan usaha² pelaksanaan konsolidasi dibidang kebudajaan, pertundjukan, pameran dan penerbitan.

Usaha² kita dibidang perguruan tinggi, pendidikan dan kebudajaan sebagai diketahui adalah usaha² untuk memperlantjar terlaksananja tjita² Baperki, djadi memperlantjar terwudjudnja masjarakat sosialis, masjarakat adil dan makmur, jang mengachiri exploitation de l'homme par l'homme.

Dalam hubungan ini patut sekali diperhatikan, bahwa dalam usaha mengkonsolidasi usaha² kita dibidang perguruan tinggi perlu lebih tegas ditudjukan untuk mendidik warganegara² jang berdjiwa Manipol-Usdek-Resopim, jang dibekali dengan technical skill tingkat sardjana, sehingga lebih sanggup membangun masjarakat sosialis.

Usaha² kita untuk mengkonsolidasi hasil usaha² kita dibidang perguruan tinggi memang sangat dipengaruhi oleh perkembangan proses menudju kemasjarakat sosialis itu sendiri. Walaupun demikian tudjuan usaha kita mengkonsolidasinja jalah untuk dapat mempertjepat proses peralihan menudju kemasjarakat adil dan makmur. Hal ini akan kita sadari lebih tegas lagi, apabila kita perhatikan kenjataan² sebagai berikut :

1. Dalam usaha kita untuk memenuhi segala aspiraties nasional kita, jang mentjetuskan proklamasi kemerdekaan nasional kita, kita tidak bisa tidak kebentur pada masalah perluasan pendidikan dari tingkat rendah, hingga tingkat tinggi, pendidikan umum, pendidikan kedjuruan, terutama kedjuruan tehnik. Sekalipun dalam tempo 20 tahun djumlah murid/mahasiswa sudah berhasil dilipat-gandakan mendjadi tiga kali lipat, jaitu dari 2.415.253 untuk tahun peladjaran 1939/1940 dan dalam tahun peladjaran 1958/1959 meningkat mendjadi 7.948.076, dalam djumlah ini termasuk 32.344 mahasiswa, tetapi untuk menjusul keterbelakangan kita dibanding dengan keadaan di-negeri² jang madju, kita masih perlu kerdja keras dan melaksanakan pengerahan funds & forces setjara lebih intensif.

2. Perkembangan kemadjuan ilmu pengetahuan sesungguhnja tergantung pada perkembangan kemadjuan masjarakat umumnja dan chususnja perkembangan kemadjuan industri. Sekalipun benar, bahwa penelitian (research) ilmu pengetahuan murni dapat dilakukan setjara tidak tergantung

daripada industri, tetapi perkembangan² penemuan dan kegunaan suatu penemuan ilmiah bagi kemadjuan penghidupan ummat manusia hanja dapat dilaksanakan dalam suatu masjarakat, dimana industrinja sudah berkembang madju. Sebaliknja kemadjuan industri sekarang ini sangat tergantung pada usaha² penelitian (research) dibidang ilmu pengetahuan jang dilakukan setjara tekun dan setjara terus-menerus. Tingkat technology, ilmu membikin barang, jang tinggi dan baik hanja dapat ditjiptakan dalam satu masjarakat jang sudah mengenal industri jang madju.

Dengan memperhatikan kenjataan ini, bahwa pekerdjaan ilmiah tidak dapat madju dalam satu kekosongan, jaitu tanpa ada perkembangan industri jang madju disekitarnja dan kemadjuan industri ini tergantung pula pada adanja ilmu technology jang tinggi, maka mendjadi djelas djuga, bahwa usaha² mengkonsolidasi hasil usaha kita dibidang perguruan tinggi sangat tergantung pada usaha² pelaksanaan pasal dua program kita, jaitu tergantung pada berhasilnja usaha mengembangkan industrialisasi disamping usaha membangun masjarakat desa dengan modernisasi pertanian untuk mentjapai adanja keseimbangan.

Selandjutnja dalam usaha melaksanakan pasal 2 program perdjuangan Baperki, ternjata terasa perlu dilaksanakan perobahan pandangan² kolot dari masjarakat dan usaha mengubah itu harus dimulai pada waktu kanak². Masjarakat kita sehingga dewasa ini kurang menaruh penghargaan pada pendidikan kedjuruan, karena buktinja orang² jang beridjazah kedjuruan, bahkan jang beridjazah ingenieur sekalipun sebagian terbesar hidup dari dagang, bukan dari pekerdjaan sebagai produsen. Belum tjukup disadari, bahwa masjarakat, jang sebagian besar terdiri dari pedagang, tukang warung, spekulan dan tukang tjatut, tidak mungkin mewudjudkan masjarakat sosialis, jang bersih dari penindasan manusia oleh manusia, jang mendjamin penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa rakut akan menderita kemelaratan. Karena dalam masjarakat demikian itu timbul perlombaan untuk me-

nimbun keuntungan sebanjak mungkin, jang menjebabkan exploitation de l'homme par l'homme.

Ini pun jang menjebabkan kita menentukan untuk melaksanakan pendidikan dasar berdasarkan prinsip Pantja Tjinta :

1. Tjinta Rakjat dan Tanah Air
2. Tjinta perikemanusiaan dan perdamaian
3. Tjinta ilmu dan kebudajaan
4. Tjinta kerdja
5. Tjinta orang-tua (ibu-bapak).

Sekalipun Pantja Tjinta ini sudah kita setudjui, tetapi hingga sekarang belum tegas dirumuskan dalam mata² peladjaran pada rumah² sekolah kita, sehingga betul² prinsip Pantja Tjinta meresap dan mendjadi darah-daging anak² lulusan sekolah² kita. Memang, sebagai minimum atau sebagai dasar kita harus melaksanakan daftar peladjaran negeri untuk mempermudah anak² dalam sekolahan Baperki ikut udjian² negeri. Tetapi kechususan sekolah² Baperki harus tergambar pada usaha menanamkan prinsip Pantja Tjinta pada anak² itu, disamping menanamkan djiwa Patriot Paripurna.

Untuk memikirkan pelaksanaan pandangan tersebut itu, maka pengurus Jajasan Pendidikan & Kebudajaan diperkuat seorang tenaga achli pendidik, jaitu Drs. Suprijo. Pelaksanaannja tentu sangat mengharap bantuan² para pengurus Tjabang², terutama pengurus Tjabang Jajasan jang mengusahakan sekolah² Baperki.

Dalam hubungan ini patut disambut dengan gembira, bahwa beberapa Tjabang telah mulai berusaha untuk melaksanakan andjuran membangun sekolah² kedjuruan. Dipertjaja, bahwa usaha² itu tentu akan memenuhi kebutuhan jang terasa ada, disamping akan mendorong kemadjuan proses peralihan menudju kemasjarakat adil dan makmur.

Paling achir dapat dikemukakan djuga, bahwa perkembangan usaha² Baperki dibidang pendidikan ini ternjata menimbulkan kebutuhan akan adanja penerbitan buku² tambahan untuk para guru, mahasiswa dan peladjar. Seksi urusan

penerbitan djadi perlu diadakan dan hendaknja dapat bekerdja. Disamping mengurus penerbitan seksi ini hendaknja dapat menjelenggarakan pameran²/pertundjukan² jang menggambarkan pada masjarakat setjara visuil kemadjuan² usaha² Baperki, jang dapat membangkitkan kegembiraan masjarakat untuk memberi bantuan, sokongan dan lain² bagi kelantjaran kemadjuan usaha² Baperki selandjutnja.

Laksanakanlah „TJORAK" setjara intensif.

Setelah kita menindjau tugas dan usaha jang wadjib dilakukan oleh Baperki dalam rangka pelaksanaan amanat „Tahun Kemenangan" seperti dituturkan diatas itu, maka terasa perlunja untuk menjempurnakan Baperki sebagai organisasi dan tjara bekerdja sebagai organisasi massa.

Menurut Saudara Djawoto, Ketua Umum PWI dalam sebuah sidang DPR, jang dibutuhkan untuk mentjapai tjara kerdja suatu organisasi dengan baik adalah pelaksanaan „Tjorak" setjara intensif. Dengan „Tjorak" itu diartikan :

TJ	= Tjita-tjita	Tjita² Baperki adalah Manipol-Usdek-Resopim dan garis Presiden tentang penjelesaian masalah golongan ketjil.
O	= Organisasi	Baperki telah berwudjud organisasi, sekalipun belum sempurna seperti jang diharapkan.
R	= Rentjana	Rentjana kerdja atau program kerdja Baperki sudah dirumuskan dan sudah tjukup didjelaskan.
A	= Aksi massa	Rentjana kerdja Baperki djuga ditudjukan untuk dapat menggalang aksi² massa.
K	= Kontrol	Kontrol atas pelaksanaan rentjana kerdja dalam wudjud aksi² massa dan kontrol atas perkembangan organisasi belum tjukup disadari dan belum dilaksanakan setjara intensif.

Dalam meneliti pengalaman dan tjara kerdja organisasi kita, kita rasakan, bahwa pelaksanaan kontrol, baik kontrol atas pelaksanaan rentjana kerdja mendjadi aksi² massa, maupun kontrol perkembangan organisasi sebagai alat pelaskana tjita² jang mendjadi tudjuan kita, masih mengalami banjak kekurangan. Rapat² anggota dan konperensi² daerah belum diselenggarakan setjara intensif disemua Tjabang dan Dewan Daerah.

Mengingat, bahwa untuk mentjapai adanja kesatuan aksi, kita perlu memperkokoh adanja kesatuan tjita², jang harus ditjapai dengan permusjawaratan², maka terasalah, bahwa adanja rapat² umum tjabang, atau pertemuan² anggota pada unit (kesatuan) organisasi jang paling ketjil seperti ranting, ada sajarat mutlak. Adanja pertemuan² atau rapat² anggota, dimana pengurus memberi pertanggungan djawab akan mentjiptakan kontrol massa jang konstruktif dan akan dapat memperhebat daja-djuang massa kita dan mempertinggi mutu Baperki sebagai organisasi massa.

Pertimbangan inilah jang menjebabkan usul, supaja setelah konperensi pleno ini seluruh organisasi Baperki melaksanakan „TJORAK" setjara sungguh² dan intensif dan dalam konperensi jad akan kita saksikan perkembangan organisasi lebih pesat daripada masa jang lalu.

Terima kasih !

SELESAIKANLAH SEGALA KONTRADIKSI SETJARA TEPAT

Untuk mendjamin pengerahan funds & forces progressif sampai tingkat paling maximum.

Konperensi pleno „Baperki" jang berlangsung di Djakarta dari tanggal 10 November hingga dengan 12 November untuk menentukan tugas² Baperki dalam perdjuangan melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan" guna memperlantjar terwudjudnja masjarakat sosialis, antara lain memutuskan dengan suara bulat beberapa pernjataan sebagai berikut :

1. Konperensi pleno Baperki menjambut dengan gembira ketegasan Presiden Soekarno didalam amanat „Tahun Kemenangan", jang menjatakan : „ ..... mengingat, bahwa hingga kini kita masih dapat mempertahankan kehidupan nasional dilapangan ekonomi, meskipun 75% dari kegiatan nasional dilemparkan kepada keamanan dan Irian-Barat, maka saja, dimana sekarang soal keamanan dan Irian-Barat itu boleh dikatakan selesai, Insja Allah merasa sanggup untuk mengatasi bottlenecks dan kesulitan² dari persoalan ekonomi dalam waktu pendek jang tidak terlalu pandjang. Sementara itu saja disini menandaskan, bahwa untuk lantjarnja pelaksanaan program ekonomi (antara lain sandang-pangan), maka perlulah benar² menjingkirkan beberapa penjakit. Diantara penjakit² itu, jang terpokok ialah terlalu parahnja penjakit komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, jang masih ngendon didalam hati dan kepala setengah alat² negara jang bersangkutan".

Konperensi Baperki jakin, bahwa kemampuan nasional kita untuk membangun pasti dapat diperbesar setjara njata dengan :

a. Menertibkan anggaran belandja negara dan memperkeras disiplin anggaran belandja, sehingga dapat lebih ditertibkan setjara effektif lagi penggunaan deviezen dan kekajaan negara dengan tudjuan mengachiri segala bentuk pemboroson dan dapat dilaksanakan ide untuk memperbanjak dan mempertjepat pelaksanaan pembangunan² jang bersifat produktif untuk memperlipat-gandakan daja-produksi nasional serta menangguhkan untuk sementara pembangunan² jang bersifat konsumtif. Dalam hubungan ini dipertimbangkan untuk melaksanakan sungguh² putusan pemerintah untuk menghentikan sama sekali import mobil sedan dan lebih mengutamakan penggunaan deviezen untuk spare-parts alat² produksi serta import bahan² baku untuk memungkinkan penggunaan alat² produksi jang ada dengan capaciteit-penuh. Disamping ini terasa lebih mendesak untuk lebih mengutamakan import alat² produksi guna menggali kekajaan² alam jang terkandung didalam bumi, air dan laut Indonesia. Air laut Indonesia sama halnja dengan air laut negeri lain mengandung bahan² kimia untuk membikin caustic soda, carporiet, asem semut dll-nja, jang sekarang masih mesti di-import dan kematjetan importnja membikin matjet produksi berbagai barang kebutuhan penting.

b. Mengikut-sertakan Rakjat setjara lebih effektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebidjaksanaan dibidang ekonomi dan keuangan dengan djalan menjempurnakan pelaksanaan „social control" untuk mendjamin adanja „social support". Untuk keperluan ini usaha menjempurnakan hak² demokrasi dalam rangka menjempurnakan demokrasi terpimpin terasa perlu mendapat perhatian lebih besar lagi. Tjara bekerdja DPR, DPR-D dan Front Nasional sebagai alat dan alat membantu untuk melaksanakan „social control", serta kemerdekaan pers perlu diperkembangkan untuk membikin effektif demokrasi terpimpin dengan ikut-sertanja Rakjat guna mengachiri setjara sistematis mismanagement pada Perusahaan³ Negara, seperti disinjalir oleh berbagai menteri sendiri, untuk mengachiri adanja kapitalisme birokrasi dan ko-

rupsi, jang merugikan usaha menempatkan Perusahaan² Negara dalam kedudukan memimpin (commanding position) seperti dikehendaki oleh Manipol.

c. Memperlantjar pelaksanaan usaha² membebaskan Rakjat petani, terutama kaum tani penggarap tanah, daripada segala belenggu jang masih terasa mengekang meningkatnja daja-produksinja, a.l. dengan mempertjepat pelaksanaan setjara sungguh² UU Bagi-Hasil dan Landreform dengan tudjuan mempertinggi daja-produksi pertanian setjara menguntungkan usaha mempertinggi daja-beli Rakjat terbanjak.

2. Dalam rangka usaha membantu pelaksanaan pengerahan funds & forces progressif sampai pada tingkat maximum, Konperensi Baperki berpendapat akan perlunja ada usaha² njata untuk :

a. Menjelesaikan segala matjam kontradiksi jang njata ada dalam masjarakat setjara tepat dan tidak membatasi pengertian pengerahan funds & forces jang harus dikerahkan hanja pada „idle money" atau „hot money". Penjelesaian kontradiksis dalam masjarakat setjara tepat akan memperbesar djumlah funds & forces progressif jang dapat dikerahkan untuk melaksanakan Manipol setjara lebih sungguh². Dalam hubungan ini dapat dikemukakan, bahwa kegandjilan² jang ternjata ada, umpamanja ongkos pemiliharaan kera dalam Kebon Binatang di Semarang ditentukan Rp. 16,— sehari padahal upah buruh harian DPU kotapradja Semarang hanja Rp. 9,— sehari ; ketentuan harga kopra ditentukan sedemikian rupa, sehingga praktis hampir meniadakan nafsu membikin kopra dan membikin banjak alat produksi minjak kelapa mendjadi menganggur ; banjak sedan baru membandjir masuk, sedangkan banjak alat pengangkutan umum keadaannja menjedihkan dan menimbulkan kematjetan karena kekurangan spare-parts ; dll-nja lagi perlu segera diatasi untuk membangkitkan kegairahan berproduksi dan mempertinggi daja-produksi nasional.

b. Memperluas adanja Musjawarah Nasional bagi para pengusaha mendjadi Musjawarah Nasional antara kekuatan² produktif didalam negeri kita, jang meliputi buruh, tani, tjendekiawan, pengusaha nasional dan domestik untuk memperlantjar usaha menjelesaikan rupa² kontradiksi didalam masjarakat setjara tepat, jang menguntungkan pelaksanaan pengerahan funds & forces progressif guna memperlipat-gandakan daja-produksi nasional. Musjawarah matjam ini hendaknja diselenggarakan oleh pimpinan Front Nasional Pusat.

c. Membantras setjara lebih intensif sisa² pandangan rasialis, jang merupakan salahsatu bottle-necks dalam usaha mentjapai hasil maximum dalam pengerahan funds & forces. Apalagi terasa ada usaha dari sementara rasialist untuk membelokkan perhatian orang daripada sasaran tombak revolusi Indonesia, jang tegas menudju kemasjarakat sosialis.

PERKOKOHLAH TERUS BARISAN „NEW EMERGING FORCES"

Tjegah berhasilnja siasat „old established forces" untuk „membeli"/„menjewa" orang² Asia membunuh orang Asia.

Konperensi Pleno Baperki Pusat, jang dilangsungkan di Djakarta dari tanggal 10 hingga dengan 12 November 1962 untuk merumuskan tugas² Baperki dalam rangka melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan" untuk mendjamin kelantjaran proses menudju kemasjarakat sosialis, antara lain menerima dengan suara bulat putusan² sebagai berikut:

1. Konperensi Pleno Baperki dengan gembira menjambut dan mendukung sepenuhnja ketegasan Presiden Soekarno, jang dikemukakan dalam amanatnja pada para pemuda/mahasiswa A-A-A pada peringatan Hari Pahlawan di Tokio. Dalam amanat itu Presiden Soekarno mempertegas, bahwa Indonesia berdiri dalam barisan „New Emerging Froces of the World" (barisan kekuatan² baru, jang sedang tumbuh didunia), jang kini sedang berdjuang membangun dunia baru. Walaupun didunia kita masih berdiri „the old established forces" (kekuatan² konservatif), tapi kekuatan² „the new emerging forces"-lah jang kini makin mendjadi, mendalam, meluas dan akan menghantjurkan sama sekali kekuatan kolot itu".

Berdasarkan dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden Soekarno itu, **Konperensi Pleno mengharap Pemerintah RI segera mengambil tindakan² seperlunja** guna mentjegah berlangsungnja dan terulangnja pelanggaran² kasar dan sewenang² terhadap kedaulatan nasional negeri² „new emerging forces", jaitu antara lain berupa blokade ekonomi terhadap Kuba, pengintaian² dengan pesawat² terbang U-2

terhadap Kuba, jang pernah dialami sampai 7 kali oleh RI sendiri dan lain²nja lagi oleh kekuatan² „old established forces".

2. Konperensi Baperki menjambut dengan gembira dan dengan suara bulat mendukung ketegasan sikap Pemimpin Besar Revolusi Rakjat Kuba, Fidel Castro, dalam mempertahankan hak kedaulatan Rakjat Kuba untuk menentukan sendiri nasibnja dan sistim masjarakat jang dikehendaki bebas dari tjampur tangan asing.

Dalam rangka memperkokoh the new emerging forces dan melaksanakan ketegasan pernjataan chidmat dalam alinea pertama „Pembukaan UUD 1945" kita sendiri, jang menjatakan: „bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"., Konperensi Baperki mengharap pemerintah RI dapat mengambil tindakan² seperlunja untuk mendjamin pelaksanaan hak Rakjat Kuba untuk hidup merdeka dan untuk mempertahankan kemerdekaan nasionalnja guna bebas memilih sistim masjarakat dan bentuk pemerintahan jang dikehendakinja sendiri, **sesuai dengan Piagam PBB.**

3. Dalam rangka memperdjuangkan pelaksanaan kerangka ke-3 revolusi Indonesia menudju kemasjarakat sosialis, Konperensi Baperki dengan tjemas mengikuti perkembangan sengketa tapal batas, warisan djaman usang jang telah lampau, antara pemerintah Republik India dan Republik Rakjat Tiongkok. Apalagi setelah kita memperoleh kenjataan bahwa adanja sengketa tapal-batas, jang meningkat mendjadi clashes bersendjata, ternjata didjadikan alasan oleh old established forces untuk memperhebat pelaksanaan siasatnja untuk mengadu-domba kekuatan² new emerging forces, untuk melaksanakan politik orang² Asia diberi sendjata untuk membunuhi orang² Asia sendiri!

Rakjat India jang pernah dengan tegas menentang politik old established forces untuk „menjewa", atau „membeli" orang² Asia guna membunuhi orang² Asia sendiri tentunja berusaha untuk tidak terdjeblos kedalam siasat old esta-

blished forces, jang menggunakan adanja sengketa tapal-batas untuk mengobral sendjata² alat pembunuh manusia.

Konperensi Pleno Baperki mengharap supaja PJM Presiden Soekarno, jang sekarang masih berada diluar negeri untuk istirahat, mengambil langkah² jang dipandang perlu dan berguna untuk membantu mentjiptakan iklim baik guna memungkinkan penjelesaian sengketa tapal-batas India-RRT dengan djalan damai setjara memperkokoh kedudukan „the new emerging forces" dalam perdjuangan melaksanakan likwidasi imperialisme sesuai dengan semangat A-A. Dalam hubungan ini terasa perlunja memperkokoh desakan pada pemerintah² India dan RRT untuk segera menjetudjui pertama² adanja „cease fire", menghentikan pertempuran², jang segera harus disusul oleh adanja perundingan untuk menentukan garis stand-fast guna memungkinkan perundingan² menjelesaikan sengketa tapal-batas dengan djalan damai.

4. Konperensi Pleno Baperki menjambut dengan gembira dan mendukung ide Presiden Soekarno untuk menjelenggarakan „new emerging forces games" dan mengharap penjelenggaraannja dapat dilaksanakan dalam rangka usaha menggalang setiakawan anti-imperialisme jang lebih kokoh dari semua new emerging forces, jang menguntungkan pelaksanaan kerangka ke-3 revolusi Rakjat Indonesia menudju kemasjarakat sosialis.

5. Konperensi Pleno Baperki menjambut dengan gembira berita² jang menggambarkan kemadjuan persiapan² Konperensi² Wartawan A-A dan Buruh A-A dengan harapan, bahwa adanja Konperensi Wartawan² dan Buruh A-A itu akan menguntungkan perdjuangan Rakjat Indonesia untuk mengkonsolidasi kekuatan guna memperhebat setiakawan Rakjat² A-A untuk merealisasi tudjuan Revolusi Indonesia sendiri.

Djakarta, 12 November 1962.

Konperensi Pleno Pusat Baperki
Pimpinan Sidang
ttd.
Siauw Giok Tjhan

Ali Sastroamidjojo S.H.:

NASIONALISME KITA, ANTI KAPITALISME, KOLONIALISME DAN IMPERIALISME

Menteri/Wk Ketua MPR-S Ali Sastroamidjojo, dalam tjeramahnja kepada mahasiswa² digedung Universitas „Baperki" didjalan Tangerang, Djakarta, malam Sabtu, setjara populer sekali menguraikan masalah² disekitar pertumbuhan perasaan nasionalisme di Eropah Barat dalam perbandingan dengan tumbuhnja nasionalisme dari Rakjat² Timur, chususnja Indonesia, jang menurut Ali Sastroamidjojo S.H. penuh dengan kontras².

Tjeramah tersebut didahului dengan uraian populer mengenai tumbuhnja perasaan nasionalisme di Eropah Barat melalui revolusi Perantjis dalam tahun 1789, dimana pada saat itu timbul perlawanan² dari kaum bordjuis terhadap kekuasaan feodal jang waktu itu mengandung perspektip kapitalistis.

Situasi demikian menurut Ali Sastroamidjojo S.H. sangat berbeda dengan timbulnja perasaan nasionalisme di Indonesia jang tumbuhnja merupakan reaksi melawan penindasan² kaum pendjdjah dari luar dan tekanan² kaum feodal didalam negeri, sehingga sifat nasionalisme Indonesia tidak kapitalistis seperti di Eropah Barat, tapi sebaliknja anti-kapitalisme, anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Dalam uraian selandjutnja, Ali Sastroamidjojo S.H. mendjelaskan masalah² disekitar perkembangan sedjarah perdjuangan bangsa kita setjara lebih konkrit, jang ditjetuskan dengan tampilnja Bung Karno dalam tahun 1927 untuk menuntut „Indonesia Merdeka Sekarang Djuga" (4 Djuni 1927), dan seperti telah diketahui, kemerdekaan itu di-tjita²kan sebagai djembatan emas untuk mentjapai pembentukan masjarakat adil-makmur jang kini lebih dikenal dengan definisi masjarakat sosialis Indonesia.

Persatuan, sendjata ampuh.

Oleh Ali Sastroamidjojo S.H. dikatakan djuga, bahwa karena pertumbuhan nasionalisme Indonesia itu berhadapan muka dengan politik petjah-belah kaum pendjadjah, maka timbullah keharusan untuk memupuk persatuan militan revolusioner, sehingga bentuk nasionalisme kita itu tidak boleh bersifat sempit serta sovinistis. Hal ini telah terbukti mendjadi sendjata ampuh dalam revolusi kemerdekaan kita sampai tahun 1945.

Dalam menguraikan definisi nasionalisme jang menurut Ali Sastroamidjojo S.H. adalah suatu kesadaran daripada perasaan menganggap se-olah² perasaan nasionalisme itu baru ada sesudah ada nasion.

Ali Sastroamidjojo S.H. kemudian mendjelaskan, bahwa oleh karena itu, maka didunia kita ini tidak ada bangsa jang keturunannja harus sama sehingga Ali Sastroamidjojo S.H. berpendapat, bahwa akan berbahajalah djikalau dalam mempersoalkan masalah bangsa (nasion) dipakai masalah keturunan sebagai dasarnja. Hal ini terbukti didjaman Hitler dulu.

Persatuan sebagai cement nasionalisme.

Hanja kemauan untuk ber-satu-lah jang menurut pendapat Ali Sastroamidjojo S.H. mendjadi „cement" nasionalisme.

Selandjutnja, dalam menguraikan masalah asimilasi pada kesempatan tanja-djawab setelah Ali Sastroamidjojo S.H. mengachiri tjeramahnja selama 2 djam lebih, berkatalah Wk Ketua MPR-S itu, bahwa dalam men-tjita²kan lekasnja terlaksana ide asimilasi, harus ditjatat, bahwa hal ini bukan sekedar problim politik, tapi djuga merupakan problim sosial, sehingga terasa perlunja untuk ber-hati² dan tidak gegabah.

Didjelaskan djuga bahwa pembitjara tidak dapat membenarkan ide untuk membikin „uniform" nama, karena nasionalisme harus diudji dari perasaan seseorang nasionalis, dan bukan dari namanja. Keterangan ini ditambah dengan pendjelasan, bahwa sebagai bukti akan benarnja pendapat ini

dapat dilihat dalam diri Kartosuwirjo, jang menurut Ali Sastroamidjojo S.H. sekalipun bernama Indonesia, tapi memberontak terhadap „Republik Indonesia". Karena itu, nama bukanlah garansi, kata Ali Sastroamidjojo S.H., jang kemudian berkata, bahwa nama jang kita terima sebagai pemberian orang tua haruslah dihormati.

Statement Pengurus Besar Partindo :

SEKALI LAGI TENTANG PENGERAHAN FUNDS AND FORCES

Sedjak dari Presiden Soekarno mengamanatkan Manifesto Politik, jang sekarang telah dinjatakan sebagai garis² besar haluan negara, kita mestinja telah berusaha keras untuk mentjiptakan „iklim baik" untuk dapat mengerahkan seluruh funds and forces progresif sampai pada tingkat paling maximum.

Dalam instruksi Presiden sebagai Komando Panglima Besar Komando Operasi Ekonomi, kita djumpai berbagai ketegasan untuk melaksanakan **pengerahan funds and forces** jang dapat mempertinggi daja-produksi nasional, sehingga dapat diperhebat daja-djuang Rakjat dan daja-tempur nasional setjara simultan untuk mendjamin kembalinja Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia sebelum tahun 1962 berachir.

Djustru dalam taraf meningkatnja perdjuangan Trikora sekarang ini Partindo, merasa perlu mengingatkan kembali kepada Pemerintah dan Rakjat Indonesia umumnja, terutama kepada segenap kaum marhaen, supaja kita tidak sekedjappun lalai agar dalam setiap tindakan politik maupun ekonomi, berpangkal dari pengerahan funds and forces, dan karena itu selalu berdjuang untuk melenjapkan segala hal jang merintanginja, djustru dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden sebagai Panglima Besar Komanda Operasi Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas jang diberikan oleh Manipol pada kita semua dan melaksanakan Komando Panglima Besar Komando Operasi Ekonomi itu, ternjata perlu sekali diperhatikan supaja melenjapkan berbagai matjam „bottle

necks", jang selama ini terasa menghambat ditjapainja hasil setjara maximum dalam pengerahan funds and forces progresif dan usaha mempertinggi daja-produksi nasional setjara njata. Lebih pula sekarang ini, setelah arus inflasi terasa meningkat, kita tentunja semua lebih merasakan perlunja ada tindakan² lebih positip jang dapat mempertinggi daja-produktivitatip tenaga, modal dan alat produksi jang tersedia didalam negeri, sehingga procentage meningkatnja daja-produktivita itu dapat mengatasi procentage inflasi, supaja inflasi dapat dikendalikan untuk dihapuskan sama sekali.

Beberapa „bottle-necks" jang harus diperhatikan untuk diusahakan lenjapnja antara lain adalah :

1. Berbagai matjam **pungutan extra di-daerah²**, jang tidak berdasarkan Undang² jang memperberati beban bagi kaum producent kita. Pungutan² ini seperti antaranja terhadap **kopra** diberbagai daerah, menekan rendah penghasilan jang didapat oleh para producent kopra, petani kelapa, sehingga melenjapkan kegairahan untuk mempertinggi daja-produktivitanja.
2. Berbagai peraturan didaerah, jang praktis menggrowoti peraturan dan politik umum pusat. Umpamanja ketetapan MPRS dengan tegas menentukan, bahwa modal swasta, baik domestik maupun nasional, diberi kesempatan untuk bekerdja dan memperluas aktivitanja dibidang industri ringan, tingkat sedang jang besar. Tetapi ada daerah jang mengadakan ketentuan², atau membiarkan berlaku terus ketentuan² warisan djaman „penjelewengan", jaitu djaman sebelum ada Manipol, jang tidak membangkitkan kegairahan bekerdja modal swasta itu, seperti warisan daripada peraturan Menteri Perekonomian Iskaq S.H. dahulu jang menentukan sjarat komposisi modal, apabila dilaksanakan dalam suasana tertekan, pasti tidak menguntungkan usaha mentjiptakan „iklim baik" bagi pengerahan funds and forces progresif.
3. Berbagai peraturan warisan djaman „penjelewengan", djaman sebelum Manipol dibidang perdagangan, import,

export dan interinsulair, mengundang kegandjilan karena antaranja mewadjibkan tiap orang warga-negara Indonesia untuk membuktikan bahwa orang-tuanja djuga dilahirkan di Indonesia.
Peraturan ini mengundang „diskriminasi", karena U.U. kewanga-negaraan R.I. menentukan, bahwa tidak hanja orang jang dilahirkan sebagai keturunan kedua dari seorang asing, dapat mendjadi warga-negara Indonesia. Pun orang jang dilahirkan dari orang tua asing, menurut ketentuan U.U. tersebut dapat mendjadi warga-negara Indonesia. Ketentuan tersebut tidak mentjiptakan „iklim baik" jang memelihara dan memperkokoh rasa bersatu, rasa senasib dan sepenanggungan, sebagai warga-negara Indonesia tunggal, jang djustru diperlukan untuk mentjapai tingkat paling maximum daripada konsentrasi segala kekuatan nasional revolusioner, seperti ditugaskan oleh Manipol.

4. Masih adanja pedjabat negeri jang „main minta bukti kewarga-negaraan" dan ada djuga sementara orang, jang tjoba mengandjurkan dan mengadakan tekanan psychis, supaja orang² keturunan asing mengganti namanja dengan nama jang dikatakan asli. Sistim main minta bukti ini terang merugikan „iklim baik" untuk memupuk rasa „warga-negara Indonesia tunggal" dan adanja andjuran mengganti nama, terang bertentangan dengan nasionalisme Pantja Sila, jang berdjiwa besar, jang menentang rasialisme menentang chauvinisme, serta merugikan Pantja Sila sebagai alat pemersatu, jang mewadjibkan bukan hanja toleransi ideologie politik untuk mentjiptakan Gotong-Rojong dengan poros Nasakom, melainkan djuga toleransi dalam menghadapi perbedaan „physical and cultural traits", djadi djuga toleransi dalam menghadapi perbedaan suara nama dan agama jang dianut oleh golongan² ethnic jang banjak ragamnja dikepulauan kita ini. Lagipula andjuran „ganti nama" tidak tjotjok dengan kenjataan jang membuktikan, bahwa suara nama bukanlah garantie akan rasa tjinta tanah air seseorang. Sedang dalam tingkat revolusi kita sekarang ini, kita djustru

membuktikan rasa bersatu, bergeloranja rasa tjinta tanah air, bukan dipertadjamnja persoalan nama, jang hanja dapat menjelewengkan perhatian daripada tudjuan revolusi kita jang sesungguhnja.

Demikianlah diantara berbagai matjam „bottle-necks" jang sementara ini dapat menghambat dan meratjuni iklim baik pengerahan funds and forces demi untuk kelantjaran pelaksanaan ketetapan MPRS dan suksesnja Komando Operasi Ekonomi jang langsung dipimpin oleh Bung Karno sendiri sebagai Pemimpin Besar Revolusi kita.

Djakarta, 14 Djuni 1962.

Menteri Sudibjo :

NASIONALISME KITA BUKAN SOVINISTIS

Menteri/Sekdjen PB Front Nasional, Sudibjo, menerangkan dalam wedjangannja didepan Sidang Konperensi Pleno Baperki hari Sabtu siang digedung Universitas Baperki di djalan Tangerang, Grogol, Djakarta, bahwa sesuai dengan adjaran² agama Islam jang dianutnja, maka ia berpendapat, bahwa nasionalisme kita seharusnja di-isi dengan toleransi, hingga tidak mendjadi suatu nasionalisme jang sovinistis.

Sikap demikian itu menurut Menteri Sudibjo sesuai dengan adjaran agama Islam jang a.l. berisi adjaran untuk menilai seseorang bukan berdasarkan atas pertimbangan² asal keturunannja, tapi atas kenjataan² mengenai berguna atau tidaknja seseorang itu dalam pengabdiannja kepada masjarakat.

Dikemukakan sebagai tjontoh, bahwa pada waktu Nabi Mohammad bertindak membebaskan kaum budak, maka dibebaskanlah oleh Nabi seorang jang tidak berbangsa Arab, tapi berasal dari keturunan Afrika, jaitu Bilal, jang setelah pembebasannja dari belenggu² perbudakan ternjata mendjadi seorang jang setia terhadap Nabi dan dapat diserahi tugas mendjadi Muadzin.

Hal ini dikemukakan oleh Menteri/Sekdjen PB Front Nasional dengan pendjelasan, bahwa sekali lagi ternjata, amal manusialah jang paling utama dalam kita menilai perbuatan seseorang didalam masjarakat, dan bukan asal keturunannja jang harus didjadikan ukuran penilaian.

Nama seseorang, kata Menteri selandjutnja, bukanlah sjarat mutlak bagi pengabdiannja terhadap nusa dan bangsa, dan berdasarkan pendapat² diatas ini, maka Menteri Sudibjo dengan tegas mengatakan, bahwa oleh karena itu, Menteri tidak dapat menjetudjui andjuran² ganti nama seseorang

warga-negara Indonesia jang berasal dari keturunan asing.

Kepada para peserta Konperensi Pleno Baperki, Menteri Sudibjo selandjutnja meminta perhatian, agar tiap² politik petjah-belah jang ditjoba diusahakan oleh kaum imperialis melalui berbagai matjam djalan, misalnja melalui usaha² untuk menimbulkan kesan se-olah² para warga-negara jang masih mempergunakan nama asalnja harus ditjap sebagai orang² jang tidak mungkin setia atau berdjasa kepada nusa dan bangsa Indonesia, diperhatikan setjara seksama agar tidak terdjadi penjelewengan djalan pikiran, se-olah² nama-lah jang harus didjadikan ukuran nasionalisme seseorang.

Wedjangan Menteri Sudibjo itu sekali lagi menegaskan, bahwa nasionalisme kita bukan sovinistis, tapi harus di-isi dengan toleransi, sesuai dengan garis jang pernah digariskan oleh Presiden Sukarno, jang dengan tegas menjatakan kepada Kongres Baperki di Solo beberapa tahun jl, bahwa nasion Indonesia ini dalam kenjataannja terdiri dari ber-bagai matjam suku² bangsa dan asal keturunan.

Kemudian, setelah selesai mengupas masalah jang me-njangkut persoalan nasion Indonesia seperti tsb diatas, Menteri Sudibjo menjatakan betapa perlu-mutlaknja usaha² kita dewasa ini dititik-beratkan kepada usaha² penjelesaian masalah ekonomi jang demikian sulitnja.

Sesuai dengan garis Pemerintah jang sekarang telah ber-tekad untuk melakukan perbaikan² dibidang ekonomi sete-lah masalah keamanan dan pembebasan Irian Barat selesai, maka oleh Menteri Sudibjo diandjurkan, agar kita semua dewasa ini ber-lomba² ikut memberikan andil kepada usaha² penjelesaian kesulitan² ekonomi.

Dalam hubungan ini didjelaskan oleh Menteri, bahwa Front Nasional jang diketuainja telah menginstruksikan ke-daerah², supaja dibentuk pelopor² kerdja di-desa², dan mengingat, bahwa pelopor² kerdja itu akan dapat berguna bagi usaha memperbaiki masalah perekonomian, maka Men-teri mengandjurkan supaja semua organisasi², termasuk Ba-perki, aktip memberikan bantuannja untuk mensukseskan pelaksanaan instruksi tsb diatas.

Achirnja, Menteri Sudibjo mensinjalir, bahwa dalam usaha

kita bersama untuk merubah struktur ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional, kita menghadapi kenjataan² tentang betapa hebatnja perongrongan jang dilakukan oleh sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme dinegeri kita, jang dalam taraf sekarang sedang dan harus melakukan perubahan² dalam bidang perekonomian jang agraris mendjadi ekonomi industri.

D.N. Aidit kepada TC Gerwani :

RASIALISME MELEMAHKAN PERSATUAN NASIONAL

— **Pantja Sila (1945) adalah kelandjutan daripada gagasan Nasakom (1926), ke-dua²nja alat-pemersatu.**

Pada tanggal 23 dan 27 Oktober 1962, Ketua CC PKI, D. N. Aidit telah memberikan tjeramah kepada Training Centre Gerwani dengan djudul „Marxisme Dalam Praktek". Setelah mendjelaskan serba singkat tentang tiga komponen daripada Marxisme, jaitu filsafat, ekonomi politik dan Sosialisme, Aidit mendjelaskan beberapa aspek daripada praktek Marxisme di Indonesia, jang singkatnja a.l. sbb :

Bukanlah suatu kebetulan, bahwa dalam buku Bung Karno **Dibawah Bendera Revolusi** artikel pertamanja jalah tulisan jang berdjudul **Nasionalisme, Islamisme** dan **Marxisme.** Ini harus diartikan, bahwa sedjak ditulisnja artikel itu, dalam tahun 1926, jang memuat analisa jang mendalam tentang keadaan sosial dan politik Indonesia, gagasan Nasakom sudah lahir. Sedjak itu perdjuangan Rakjat Indonesia, disedari atau tidak disedari, berlangsung dan mentjapai kemenangan² dibawah kibaran pandji² Nasakom. Tanpa memahami ini tak seorang pun ahli sedjarah atau ahli politik akan dapat mengerti apa jang sedang terdjadi di Indonesia sekarang.

Pantja Sila jang ditjetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Djuni 1945 adalah kelandjutan daripada gagasan Nasakom tahun 1926 itu. Tanpa mengerti betul isi dan semangat tulisan **Nasionalisme, Islamisme** dan **Marxisme** orang tidak mungkin mengerti apa sebenarnja Pantja Sila. Orang² jang

tidak mengerti atau tidak mau mengerti Pantja Sila *inilah* jang suka menggunakan Pantja Sila untuk menimbulkan perpetjahan didalam persatuan nasional. Padahal baik gagasan Nasakom maupun Pantja Sila adalat alat pemersatu seluruh Rakjat revolusioner. Demikian pula **UUD 1945** adalah djuga alat pemersatu setelah Rakjat Indonesia mempunjai alat perdjuangan jang berupa negara, sedangkan Manipol (1959) adalah program bersama jang harus dilaksanakan oleh Rakjat jang bersatu dengan landasan Nasakom, Pantja Sila dan UUD 1945.

Djadi, gagasan Nasakom (1926), Pantja Sila (Djuni 1945), UUD 1945 dan Manipol (1959) adalah satu kesatuan jang tidak ter-pisah²kan dalam usaha Rakjat Indonesia menjelesaikan revolusi nasional-demokratisnja dan selandjutnja dalam menudju ke Sosialisme. Inilah interprestasi jang rasionil terhadap dokumen² bersedjarah itu.

Tanpa Menjetudjui Nasakom Tidak Mungkin Mendjadi Pemimpin Rakjat Indonesia.

Ada orang jang mau mendjadi pemimpin Rakjat Indonesia, atau menamakan dirinja pemimpin Rakjat Indonesia, tapi tidak menjetudjui Nasakom. Atau ada djuga jang menjetudjui hanja dalam kata², tapi dalam perbuatan tidak, atau mendjalankan „dubbel boekhouding", jaitu dimuka orang banjak kemak-kemik Nasakom, tapi dalam „lingkungan ketjil" menentang Nasakom. Orang² demikian ini tidak mungkin mendjadi pemimpin Rakjat Indonesia jang sungguh² dan pengikut²nja sendiri akan bingung karena mukaduanja.

Apa sebabnja ? Setjara kasar kekuatan politik di Indonesia sekarang terbagi tiga, jaitu : **sepertiga Nasonalis, sepertiga Agama** dan **sepertiga Komunis.** Seorang pemimpin jang tidak menjetudjui Nasakom, ia hanja pemimpin sepertiga daripada Rakjat Indonesia, atau paling banter duapertiga, dan pemimpin demikian itu tidak bisa dinamakan pemimpin Rakjat Indonesia. Ia pemimpin „ompong". Djuga pemerintah jang tidak Nasakom adalah pemerintah „om-

pong". Saja minta kepada kader² revolusioner baik pria maupun wanita, djuga kepada kader² Gerwani, supaja djangan mau mendjadi pemimpin „ompong" ; djadilah pemimpin jang lengkap giginja, jang Nasakom sesuai dengan Konsepsi Presiden Soekarno.

Kalau saja berkata bahwa imbangan kekuatan politik sekarang setjara kasar kira² 3 × sepertiga, ini bukanlah status-quo. Tiap² aliran politik jang pro-Manipol berhak memperbesar kekuatannja asal sadja tidak dengan djalan djegal²an atau srimpung²an, karena ini tidak sesuai dengan alam Demokrasi Terpimpin. Djalan memperkuat diri bagi tiap² aliran politik jang pro-Manipol, jalah ber-lomba² mengabdi kepentingan Rakjat, memperhebat amal kepada Rakjat, melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. Inilah djalan damai untuk menjelesaikan revolusi nasional-demokratis kita guna selandjutnja menudju ke Sosialisme.

Kita sekarang sudah mempunjai organisasi Front Nasional jang baik dan hebat. Tiap² orang revolusioner Indonesia harus berbangga hati mempunjai organisasi FN seperti jang kita miliki sekarang. Tetapi, djangan sekedjap mata dilupakan FN hanja bisa kuat djika kekuatan pokok revolusi, jaitu kaum buruh dan kaum tani mendjadi kekuatan pokok pula daripada FN. Dan ini hanja mungkin djika FN sungguh² mengabdi kepentingan kaum buruh dan kaum tani.

Oleh karena itulah saja mengharapkan agar Gerwani lebih giat lagi bekerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani, chususnja dikalangan wanitanja.

Rasialisme Harus Terus Diperangi, Karena Melemahkan Persatuan Nasional.

Kaum reaksioner tidak suka persatuan nasional kita mendjadi kuat, oleh karena itu mereka tidak henti²nja menimbulkan perpetjahan dalam persatuan nasional kita. Disamping me-njebar²kan Komunisto-phobia, Rakjat-phobia, dsb mereka berusaha untuk me-ngobar²kan rasialisme. Dalam rangka mendjilat imperialis Amerika Serikat, chususnja dalam rangka untuk mendapat kredit dari negara besar itu, sebagaimana djuga tuan Nehru dari India, kaum reaksioner

dinegeri kita terus-menerus mentjari kesempatan untuk mengobar²kan semangat anti-Tionghoa dan mempertentangkan warga-negara „asli" dan „tidak asli".

Tetapi untuuglah perdjuangan bangsa Indonesia mempunjai tradisi jang baik dalam menentang rasialisme, dan pembinaan nasion Indonesia berdjalan ber-sama² dengan perdjuangan melawan rasialisme. Sedjak **Indisch Partij** tahun 1912 kita sudah berdjuang melawan rasialisme, dan Bung Karno sendiri adalah tokoh terkemuka dalam perdjuangan melawan rasialisme.

Bung Karno pernah dikritik oleh orang² sovinis ketika beliau memasukkan dua orang Tionghoa, jaitu Saudara Kwee Kek Beng dan Dr. Kwa Tjoan Sioe kedalam redaksi madjalah **Suluh Indonesia Muda.** Beliau namakan kritik demikian sebagai pendirian orang jang „sempit budi", sebagai „katak dibawah tempurung". Tidak seperti kaum rasialis kita sekarang, Bung Karno pada waktu itu tidak mengandjurkan kepada Sdr. Kwee Kek Beng dan Dr. Kwa Tjoan Sioe untuk mengganti nama mereka dengan nama „asli" misalnja dengan Badjigur atau Rudjak Sentul.

Rasialisme jang mempersoalkan penggantian nama adalah rasialisme jang paling koprot, paling tidak masuk akal, paling tidak ilmiah, dan dinegeri kita telah menimbulkan banjak lelutjon dan kesedihan. Waktu Lany Gumuljo memenangkan banjak medali dari kolam renang Asian Games jbl. Gumuljo S.H. direktur Bank Timur banjak dapat salam dari kiri dan kanan karena banjak orang mengira Lany Gumuljo adalah keponakan Gumuljo S.H., dan seorang pun tidak bertanja „siapa sih nama Tionghoanja ?". Tapi olahragawan keturunan Tionghoa jang sudah ganti-nama tapi menderita kekalahan ditanjakan orang „siapa sih nama Tionghoanja ?"

Ada lagi tjontoh jang menjedihkan. Seorang kapitalis demi mendapat fasilitet² dia ganti-nama. Mula² nama „asli" itu dia dapat fasilitet², tetapi setelah ketahuan bahwa dia tidak „asli" fasilitetnja ditjabut, dan sebagai balasan dia meninggalkan kewarga-negaraan Indonesia dengan membawa nama „asli", sehingga ia mendjadi warga-negara asing dengan nama „asli" Indonesia.

Oleh karena itu kita harus terus memerangi rasialisme jang koprot ini. Bagi kita pasti masih lebih baik Drs. Kho Bian Tie, anggota Staf Komando Operasi Ekonomi, jang namanja tidak „asli", daripada Kartosuwirjo bekas kepala gerombolan DI-TII, jang namanja „asli" atau dikira „asli".

Sesuai dengan tradisi anti-rasialisme kita jang sudah setengah abad lamanja, marilah kita teruskan perdjuangan melawan rasialisme, baik jang berbentuk purbasangka warna kulit, purbasangka keturunan maupun jang bentuknja paling rendah dan paling koprot, jaitu ganti-nama, apalagi setjara paksa. Perdjuangan melawan rasialisme adalah perdjuangan untuk meniadakan kontradiksi jang tidak perlu dikalangan Rakjat, dan ini berarti memperkuat persatuan nasional.

Sebagai penutup saja mengharap kepada kader² Gerwani supaja terus berdiri dibarisan depan dalam perdjuangan untuk emansipasi wanita, tetapi sekedjappun djangan lupa bahwa emansipasi jang sungguh² hanja terdapat dalam masjarakat Sosialis, dimana terdapat emansipasi antara sesama manusia. Oleh karena itu Gerwani harus mendjadi bagian jang tak-terpisahkan daripada perdjuangan umum Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan demokrasi, untuk emansipasi antar-manusia dan antar-bangsa, dan untuk Sosialisme.

SOAL NAMA „ASLI" DAN „TIDAK ASLI"

Kutipan dari induk karangan s.k. „MERDEKA" tgl 12 Nopember 1962.

METERI Sekdjen Front Nasional Sudibjo dalam pidato-nja Sabtu siang jbl, menjatakan bahwa „nama seseorang bukanlah sjarat mutlak bagi pengabdiannja terhadap nusa dan bangsa, dan berdasarkan pendapat ini maka Menteri Sudibjo dengan tegas menjatakan tidak dapat menjetudjui andjuran² ganti nama seseorang warga-negara Indonesia jang berasal dari keturunan asing. Menteri mengatakan bahwa sesuai dengan adjaran² agama Islam, maka nasional-isme kita seharusnja di-isi dengan toleransi, hingga tidak mendjadi suatu nasionalisme jang sovinistis. Dikemukakan satu tjontoh dari sedjarah Islam, betapa seorang jang bukan berbangsa Arab akan tetapi berasal dari Afrika, jakni Bilal, dapt mendjadi seorang jang setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan bahkan oleh Nabi diserahkan tugas sebagai Muadzin.

Kita sepenuhnja sependapat dengan pendirian Menteri Sekdjen Front Nasional tsb. Dan kita harapkan hendaknja dalam persoalan nama seseorang ini ada ketegasan dan ke-djelasan. Djangan hendaknja sampai bisa timbul fitnah atau pendapat² tidak sehat jang berasal dari paham nasionalisme jang sovinistis, bahwa orang² atau warganegara² Indonesia keturunan asing jang tidak mengganti namanja dengan se-buah nama Indonesia dianggap a-nasional atau anti-nasional. Begitupun hendaknja djangan sampai timbul fitnah jang se-wenang² kepada orang² jang berpendapat bahwa nama se-seorang tidak usah di-ganti², bahwa orang² ini anti-nasional, kontra revolusioner atau tuduhan² sematjamnja ! Kita malah

berpendapat bahwa orang² jang „mengandjurkan" setjara paksa ataupun „mengandjurkan setjara halus" warganegara² Indonesia jang tidak mempunjai „nama asli" untuk menggantikan namanja dengan sebuah nama „asli", merekalah jang sebenarnja a-nasional atau tidak mengerti Pantjasila, ke-bhineka-tunggal-ika-an Indonesia, Manipol-Djarek dan Resopim.

Kita masih terlalu banjak mendengar kedjadian² jang tidak pada tempatnja disekitar persoalan „nama asli" dan „tidak asli" ini. Sampai² dikalangan kewartawanan atau tegasnja PWI dialami kedjadian² jang tidak pada tempatnja. Seorang pedjabat Deppen malah pernah meretour kembali permintaan PWI untuk mendapatkan kartu-pers bagi seorang anggotanja dengan alasan „perlu dibuktikan dulu kewarga-negaraannja". Kita sesalkan bahwa hal² seperti itu masih bisa terdjadi, padahal PWI adalah satu organisasi wartawan nasional jang dengan sendirinja bertanggung-djawab dan mendjamin bahwa seluruh anggotanja adalah warganegara² Indonesia, bukan asing ! Kesimpang-siuran dalam soal w.n. „asli" dan „tidak asli" ini menjebabkan peristiwa² seperti itu terus-menerus timbul. Dalam mentjari pemetjahannja tidak bisa lain kita harus kembali kepada perinsip² Pantja Sila dan ke-bhineka-tunggal-ika-an Indonesia. Ini berarti bahwa tidak ada seorang w.n. Indonesiapun jang boleh dipaksa atau „diandjurkan" untuk mengganti namanja !

Tjatatan : Sebagai response, induk karangan „Merdeka" ini dimuat kembali selengkapnja dalam ruangan „Komentar" s.k. harian „Bintang Timur" tgl 13 Nopember 1962.